

**UPAYA KONTRA TERORISME UNI AFRIKA DALAM MENGATASI
KELOMPOK TERORISME AL QAEDA IN THE ISLAMIC MAGHREB
DI MALI TAHUN 2013-2023**



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

RADIFAN FADLI RAHMAN

21323069

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**UPAYA KONTRA TERORISME UNI AFRIKA DALAM MENGATASI
KELOMPOK TERORISME AL QAEDA IN THE ISLAMIC MAGHREB
DI MALI TAHUN 2013-2023
SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

RADIFAN FADLI RAHMAN

21323069

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN
UPAYA KONTRA TERORISME UNI AFRIKA DALAM MENGATASI
KELOMPOK TERORISME AL QAEDA ISLAM IN MAGHREB DI
MALI TAHUN 2013-2023

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal
22 Agustus 2025
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Dewan Penguji

- 1 Hasbi Aswar, S.IP. M.A., Ph.D.
- 2 Khairul Munzilin, S.IP., M.A.
- 3 Ayu Heryati Naqsabandiyah, S.IP., M.A.
- 4 Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 22 Agustus 2025



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Radifan Fadli Rahman".

Radifan Fadli Rahman

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka.....	7
1.6 Kerangka Pemikiran	10
1.7 Argumen Sementara	12
1.8 Metode Penelitian	13
1.8.1 Jenis Penelitian	13
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	13
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	13
1.8.4 Proses Penelitian.....	14
1.9 Sistematika Pembahasan.....	14
BAB 2 PERMASALAHAN TERORISME DI MALI.....	15
2.1 Kelompok Al-Qaeda Islam in the Islamic Maghreb.....	15
2.2 Ragam Aksi Pemberontakan Terorisme di Mali	18
2.3 Respon Pemerintah Mali Terhadap Aksi Pemberontakan Terorisme.....	21
2.3.1 Pemerintah Mali.....	22
2.4 Respon Organisasi Internasional Terhadap Aksi Terorisme	24
2.4.1 Organisasi Internasional.....	24
2.4.2 Uni Afrika	26
2.5 Peran Penting Uni Afrika dalam Terorisme Mali.....	27
BAB 3 UPAYA KONTRA TERORISME UNI AFRIKA TERHADAP KELOMPOK TERORISME DI MALI 2013-2023	30
3.1 Upaya Proaktif Kontra Terorisme oleh Uni Afrika	30
3.1.1 Penyerangan Terhadap Kamp Teroris dan Membunuh Pemimpin Teroris 31	
3.1.2 Proses Pengumpulan Intelijen.....	35
3.1.3 Pelacakan Sumber Dana Kelompok Terorisme AQIM	38
3.2 Upaya Defensif Kontra Terorisme oleh Uni Afrika	40
3.2.1 Lembaga Penguatan Otoritas Keamanan	41

3.2.2	<i>Program Pelindungan Masyarakat Dari Bom</i>	45
BAB 4	PENUTUP	50
4.1	Kesimpulan	50
4.2	Rekomendasi.....	54
DAFTAR PUSTAKA		54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Konsep Kontra Terorisme oleh Sandler	11
Gambar 2. Grafik Aktivitas Kelompok Terorisme AQIM 20213-2023	19

DAFTAR SINGKATAN

ACSRT	: The African Center for the Study and Research on Terrorism
AFISMA	: African led International Support Mission in Mali
AQIM	: Al-Qaeda Maghreb In The Islamic Maghreb
ASF	: African Stanby Force
CONOPS	: <i>Concept of Operation</i>
DCA	: Church Aid
ECOWAS	: Economic Community of West African States
EUTM	: Europe Union Training Mission
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
MUJAO	: The Movement for Unity and Jihad in West Africa Organization
MDSF	: Mali Defense Security Force
MINUSMA	: United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali
MAG	: Mines Advisory Group
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
STR	: <i>Suspicious Transaction Report</i>
UA	: Uni Afrika
UE	: Uni Eropa
UNESCO	: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization
UNMAS	: United Nation Mine Action Service

ABSTRAK

Negara Mali menghadapi ancaman yang serius oleh kelompok teroris *Al-Qaeda In The Islamic Maghreb* dari awal tahun 2013 disebabkan karena pemerintah sedang mengalami ketidakstabilan politik sehingga tidak memiliki strategi yang efektif dalam menangani kelompok tersebut. Keterlibatan Uni Afrika sebagai aktor organisasi internasional untuk membantu negara Mali melalui beberapa strategi agar aktivitas teroris tidak menyebar ke wilayah Afrika yang lain. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan Uni Afrika terhadap Mali pada tahun 2013 hingga 2023. Dalam menganalisis upaya Uni Afrika, penelitian menggunakan teori kontra terorisme yang dikemukakan oleh Todd Sandler yang membagi menjadi dua pendekatan, yaitu Proaktif dan Defensif. Hasil dari penelitian menemukan bahwa Uni Afrika menggunakan seluruh indikator proaktif, seperti operasi militer dengan melakukan penyerangan atau menghadapi terhadap kelompok terorisme secara langsung. Sedangkan defensif, Uni Afrika melakukan penguatan lembaga keamanan bersama secara internal.

Kata-kata kunci : *Al-Qaeda In The Islamic Maghreb, Defensif, Mali, Kontra Terorisme, Proaktif, Uni Afrika.*

ABSTRACT

Mali has faced a serious threat from the terrorist group *Al-Qaeda In The Islamic Maghreb* since early 2013 due to political instability within the government, which has prevented it from developing an effective strategy to deal with the group. The involvement of the African Union as an international organisation to assist Mali through several strategies to prevent terrorist activities from spreading to other parts of Africa. The objective of this study is to examine the efforts undertaken by the African Union in support of Mali from 2013 to 2023. In analysing the African Union's efforts, the study employs Todd Sandler's counter-terrorism theory, which divides approaches into two categories: Proactive and Defensive. The study's results found that the African Union employed all proactive indicators, including military operations aimed at directly confronting or attacking terrorist groups. Meanwhile, defensively the African Union strengthened joint security institutions internally.

Keywords: *African Union, Al-Qaeda In The Islamic Maghreb, Counter Terrorism, Defensive, Proactive.*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2012 menjadi awal serangan dari kelompok separatis Tuareg terhadap pemerintah Mali. Mereka melakukan serangan brutal di kota Menasaka, Tessalit dan markas militer Aguelhok. Sebanyak 210 personel militer Mali tewas dalam serangan tersebut (Observer 2012). Akar dari permasalahan konflik berasal dari kelompok Tuareg yang ingin memisahkan wilayah Utara dari negara Mali karena pemerintah menerbitkan kebijakan yang diskriminatif bagi etnis Tuareg dan kurang mengakomodasi ekonomi dan politik mereka. Faktor tersebut menyebabkan pemberontakan yang besar di wilayah Utara (William Moraes Roberto, Marilla Bernades Closs, and Giordano Bruno Antoniazzi Ronconi 2013).

kekalahan tentara Mali dalam menahan serangan yang diluncurkan kelompok Tuareg menyebabkan para tentara frustrasi dan menyalahkan pemerintah karena bersikap pasif dan tidak memfasilitasi dengan cukup dalam menghadapi kelompok separatis, oleh karena itu para militer melakukan kudeta terhadap pemerintah Troure dalam menangani kelompok separatis sehingga negara Mali mengalami krisis yang berkepanjangan dan kebuntuan dalam mencari solusi (Sten Hagberg and Gabriella Körling 2012). konflik di Mali menjadi sangat parah karena menghadapi banyak perlawanan dari kelompok separatis dan teroris ditambah lagi dengan aksi kudeta oleh junta militer.

Melihat kondisi politik yang tidak stabil, kelompok *Al-Qaeda In The Islamic* atau dikenal dengan sebutan AQIM melihat adanya peluang untuk menyebarkan

kekuasaan. Awalnya kelompok tersebut bergerak secara rahasia, kemudian di tahun 2013 memutuskan berkoalisi dengan kelompok Tuareg untuk membantu menyusun strategi pasukan hingga pasokan senjata dalam melawan pemerintah. Namun tujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Mali Amadou Toumani Toure harus terhenti karena adanya peristiwa kudeta oleh militer yang dipimpin Amadou Haya Sanogo yang merupakan perwira militer (Cold-Ravnskilde 2013). Peristiwa kudeta tersebut tidak membuat kelompok AQIM melemah justru menjadi aktif untuk meneror masyarakat.

kelompok AQIM menjadi sumber peningkatan kekerasan yang signifikan dibandingkan kelompok teroris *Ansar Dine* dan *Movement for Unity and Jihad in West Africa* (MUJAO), hal tersebut dibuktikan jumlah peningkatan serangan terorisme di Mali dari kelompok AQIM sebesar 20 persen yang sebelumnya pada tahun 2012 hanya dibawah 5 persen (Sebastian Elischer 2022). Dengan total 120 insiden penyerangan dari kelompok tersebut menyebabkan tewasnya 211 jiwa dan terus bertambah di tahun berikutnya, kebanyakan serangan tersebut bersifat kekerasan dan pembunuhan yang sengaja (Sebastian Elischer 2022).

Pelibatan kelompok AQIM dalam konflik internal Mali melalui kerja sama dengan kelompok ekstrimis lain, tentunya mempermudah untuk mencapai tujuan dari mendirikan negara khilafah. Disisi lain, dapat menambah musuh baru yang menyebabkan eksistensi AQIM terancam. Namun, adanya aliansi kelompok ekstrimis dalam memerangi militer Mali dan Prancis, mereka berhasil menguasai sebesar 10% wilayah Mali bagian Utara, seperti Gao, Kidal dan Timbuktu Utara (Abhijit Mohanty 2018). Semakin kuatnya serangan yang dilakukan kelompok

AQIM tidak lepas dari dukungan dana yang didapatkan dari aktivitas kriminalnya, seperti penyelundupan migran, narkoba, penculikan untuk mendapatkan uang tebusan di wilayah Afrika (Mensah 2023). Hasil uang dari penculikan dan penyelundupan akan dibeli senjata di pasar gelap yang berada di Libya dan Nigeria dan menghabiskan uang mereka untuk membeli senjata berupa roket, senapan mesin berat dan *surface to air missiles* yang dapat melawan pesawat terbang dan helikopter militer Mali (William Thornberry and Jaclyn Levy 2011)..

Pemerintah Mali mengambil langkah dengan cara militer untuk mengatasi kelompok-kelompok kriminal dan teroris. Dengan membentuk unit khusus untuk keamanan di bawah wewenang Jenderal Komando wilayah Kidal sebagaimana disebutkan dalam Pakta Nasional mengenai koordinasi dengan militer terkait pelarangan penimbunan senjata dan bahan peledak ilegal. Kemudian pembentukan milisi pendukung pemerintah atau *Plateforme* yang mendukung pemerintah pusat dengan tujuan untuk membela kepentingan komunitas masa depan, seperti bantuan kemanusiaan, pelucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi pemberontak ke dalam angkatan bersenjata Mali (RFI 2016).

Dampak dari pendekatan militer yang dilakukan di Mali justru memberikan efek yang serius terhadap keamanan manusia, banyak warga sipil tidak mendapatkan kelayakan hidup dan kebebasan bergerak. Banyak kasus yang dialami para laki-laki yang dituduh menjadi bagian dari kelompok terorisme lalu ditangkap dan disiksa, bahkan beberapa dieksekusi (Harmon 2016). Selain itu, tata kelola negara yang buruk menjadi permasalahan serius yang berdampak buruk pada kinerja lembaga-lembaga negara di Mali. Akibatnya, negara Mali tidak memiliki kapasitas kelembagaan untuk melawan terorisme secara efektif. Kemudian belum

ada kebijakan kontra terorisme dalam negeri yang jelas dan kuat untuk menindak para kelompok teroris (Mensah 2023).

Kegagalan pendekatan kontra terorisme dari negara menunjukkan perlu adanya pendekatan di level internasional dalam mengelola krisis, termasuk tindakan kontra terorisme. Kegagalan militer tersebut memberikan dampak yang signifikan sehingga beralihnya kekuasaan wilayah Mali ke tangan kelompok terorisme yang ingin mendeklarasikan sebuah negara. Akhirnya pemerintah Mali meminta bantuan kepada organisasi internasional untuk melakukan intervensi darurat militer. Oleh karena itu, Pemerintah Mali mengajukan permintaan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Afrika agar mengirimkan pasukan untuk memperbaiki supremasi hukum dan memerangi terorisme di utara. Hal ini dapat berimplikasi pada agenda kontra terorisme yang lebih luas di Afrika apabila tidak ditangani dengan cepat, khususnya di kawasan Sahel. Teroris mungkin akan lebih berani melakukan kekejaman lebih lanjut di seluruh Afrika karena mengetahui bahwa tidak ada upaya yang efektif untuk melawan aktivitas mereka.

Melihat kondisi yang krisis negara Mali dan aksi teroris yang semakin masif di perbatasan bagian Utara, faktor tersebut bisa mengancam keamanan di wilayah Sahel lainnya. Melalui resolusi PBB 2085 pada bulan Desember 2012 yang isinya mengizinkan Uni Afrika sebagai pelaksanana misi lapangan untuk mengerahkan pasukan Afrika di Mali dengan alasan ibu kota Mali (Bamako) menjadi sasaran berikutnya yang tentunya integritas wilayah Mali berada dalam bahaya (Alexis Arieff 2023). Akhirnya pada tahun 2013 Uni Afrika meluncurkan misi *African led International Support Mission in Mali* (AFISMA) dengan kekuatan penuh, sebagai respon pertama misi dukungan terhadap pemerintah Mali (Maru 2013).

Pada tahun yang sama PBB mengganti operasi AFISMA menjadi misi *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali* (MINUSMA) sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2100 (Tchioffo Kodjo 2018). Permasalahan dana dan logistik misi AFISMA sehingga harus dipindahkan ke PBB. Namun, dalam pelaksanaan misi tersebut mengalami kendala dengan rezim junta yang sedang berkuasa. Pemerintah junta membatasi akses penerbangan MINUSMA sehingga gerak program tersebut menjadi terhambat dan terbatas (Ifan Wijaya 2023). Sehingga Sekretaris Jenderal PBB menyarankan untuk memberikan kewenangan militer kepada Uni Afrika agar lebih mudah berkoordinasi antar wilayahnya ditengah tersebarnya informasi pergerakan kelompok teroris yang mulai berpindah ke wilayah ibu kota bagian selatan (Mensah 2023). Secara tidak langsung kehadiran AFISMA dan MINUSMA memiliki keterkaitan sebagai respon internasional dalam menjaga Mali. Karena saat kondisi Mali masih tinggi dengan aktivitas teroris jadi memerlukan operasi militer dari AFISMA sebagai tahap awal untuk mengamankan wilayah, setelah kondisi ancaman teroris menurun baru program MINUSMA bisa dilaksanakan di Mali. Uni Afrika memiliki peran yang penting sebagai organisasi internasional yang memiliki kedekatan budaya dan geopolitik sehingga lebih mudah untuk membuka akses koordinasi atau kerjasama dengan organisasi internasional dalam menyusun strategi baru mengatasi kelompok AQIM di Mali.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya Uni Afrika dalam melakukan kontra terorisme Al-Qaeda Islam In The Islamic Maghreb di Mali 2013-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi urgensi Uni Afrika sebagai aktor penting dalam mengatasi terorisme di Mali tahun 2013-2023.
2. Menganalisis respon dan tindakan Uni Afrika dalam membantu Mali untuk mengatasi kelompok terorisme di tahun 2013-2023.

1.4 Cakupan penelitian

Dalam cakupan penelitian, Penulis akan membahas mengenai bagaimana keterlibatan Uni Afrika sebagai Organisasi Internasional dalam membantu Negara Mali mengatasi kelompok terorisme di tahun 2013-2023. Dalam studi kasus terorisme di Mali, Uni Afrika memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan perdamaian di wilayah Afrika, termasuk dalam mengatasi ancaman dan serangan kelompok terorisme di dalam wilayah ini. Melalui beberapa program yang dibentuk Uni Afrika sebagai dukungan terhadap negara Mali untuk memulihkan ekonomi, keamanan dan otoritas negara. Signifikansi mengambil tahun 2013-2023 karena melihat tingginya aktivitas terorisme di Mali yang disebabkan Terorisme AQIM. Sedangkan di tahun 2024 kelompok AQIM pecah menjadi Jama'at Nushrat ul-Islam wal al-Muslimin. Oleh karena itu, strategi Uni Afrika pada periode tahun 2013-2023 tersebut hanya ditujukan untuk kelompok teroris AQIM.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian pustaka mengenai upaya kontra terorisme yang dilakukan oleh Uni Afrika terhadap Mali ada beberapa jurnal yang saya gunakan sebagai tinjauan pustaka. Berdasarkan dari jurnal karya Isaac Mensah yang berjudul “*A Review of Mali’s Counterterrorism Approach In The light of African Union*”. Dalam jurnal tersebut membahas bagaimana kondisi pemerintah negara Mali yang yang tidak mampu dalam menangani kelompok teroris negara Mali sehingga harus melibatkan intervensi militer. Penulis mengidentifikasi penyebab pemerintah Mali tidak selalu efektif dalam mengatasi kelompok terorisme, antara lain penyebabnya: Pertama, karena kurangnya kapasitas institusional. Dalam menghadapi terorisme Mali tidak memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan teknologi yang memadai, serta kurangnya kerjasama antar lembaga yang terlibat dalam mengatasi kelompok terorisme. Kedua, kebijakan kontra terorisme yang diterapkan kurang efektif. Ketiga, Mali memiliki keterbatasan dalam membangun kapasitas dan mengontrol kelompok terorisme sehingga kelompok terorisme dengan bebas mengoperasikan basis secara bebas di wilayah teritorial. Keempat, ketidakstabilan politik yang terjadi di Mali menciptakan kondisi tata kelola yang buruk bagi negaranya sehingga sulit untuk memberi respon terhadap terorisme. Kelima, terjadinya ketegangan sosial dan konflik etnis yang berkepanjangan, keadaan ini dimanfaatkan oleh para kelompok terorisme untuk menambah jumlah anggotanya. Kelemahan negara Mali tersebut menyebabkan organisasi Internasional Uni Afrika dan Economic Community of West African States (ECOWAS) turun tangan dalam membantu Mali untuk mengatasi terorisme sejak tahun 2012 (Mensah 2023).

Jurnal yang kedua berjudul “*Strengthening the African Union (AU) Counter-Terrorism Strategy in Africa*”. Jurnal yang ditulis oleh Stanley menjelaskan tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang sedang dihadapi Benua Afrika memberikan dampak yang buruk pada perkembangan perdamaian dan integritas wilayah di negara-negara Afrika. Awalnya sebuah organisasi yang pertama dibentuk sebelum berganti nama menjadi Uni Afrika. Organization African Union (OAU) didirikan dengan tujuan untuk membebaskan kolonialisme di negara-negara Afrika melalui cara anti kekerasan dan mendorong pembangunan. Kemudian organisasi tersebut kemudian bertransformasi menjadi Uni Afrika.

Dikeluarkannya deklarasi kode etik yang menjunjung tinggi kerja sama dan koordinasi antar negara dalam memerangi aksi terorisme. Isi dari deklarasi tersebut mengecam, mencegah dan mengkriminalisasi semua tindakan terorisme, hal ini juga memberikan pedoman bersama negara-negara Afrika dalam melawan terorisme. Negara anggota mulai menjalin kerja sama dan berkoordinasi dengan negara-negara anggota terkait aksi penimbunan senjata dan bahan peledak ilegal, melakukan pengontrolan pengawasan di perbatasan. Pada tahun 2004 Uni Afrika mendirikan *The African Center for Study Research on Terrorism* (ACSRT) yang berfungsi untuk membantu meningkatkan kapasitas keamanan dalam melatih negara-negara anggota mengenai ancaman terorisme, dan menyiapkan database pembagian intelijen. Namun segala tindakan tidak bisa diterapkan dengan lancar. Uni Afrika menghadapi beberapa tantangan yang disebabkan oleh beberapa negara belum melaksanakan perjanjian yang menjadi tahap awal dari komitmen negara-negara tersebut dalam melakukan kerja sama multilateral dan internasional, namun sulit untuk meyakinkan komitmen negara-negara karena tidak semua negara

anggota terkena dampak langsung dari ancaman konflik, sehingga menganggap komitmen tersebut tidak diperlukan (Stanley O. Ehiane 2018) .

Jurnal ketiga yang berjudul “*Intervention in Mali: building peace between peacekeeping and counterterrorism*”. Dalam Jurnal tersebut membahas bagaimana adanya intervensi militer asing di Mali. Setelah kelompok terorisme bergerak ke selatan, PBB mengeluarkan resolusi dewan keamanan 2085 yang memberikan izin untuk mengerahkan pasukan Afrika di Mali karena Bamako menjadi sasaran terorisme selanjutnya, hal ini menempatkan integritas wilayah Mali berada dalam bahaya. Selain itu, Intervensi nasional yang dilakukan PBB melalui dua cara dengan menjaga perbatasan dengan MINUSMA dan operasi yang dikerahkan oleh Presiden Prancis François Hollande melalui operasi militer Serval pada 11 Januari 2013. Aksi kontra terorisme berlangsung dengan cepat dan efektif dalam beberapa bulan, memukul mundur kelompok teroris bersenjata. Namun, operasi Serval tidak digunakan sebagai kekuatan dalam jangka panjang, hanya intervensi sementara untuk memulihkan ketertiban, integritas dan legitimasi wilayah Mali. Kekurangan dari jurnal ini, penulis tidak menjelaskan nama kelompok teroris yang dimaksud dalam wilayah Mali dan kurangnya pemahaman dalam mengidentifikasi ancaman yang berasal dari kelompok teroris atau pemberontak separatisme (Charbonneau 2017).

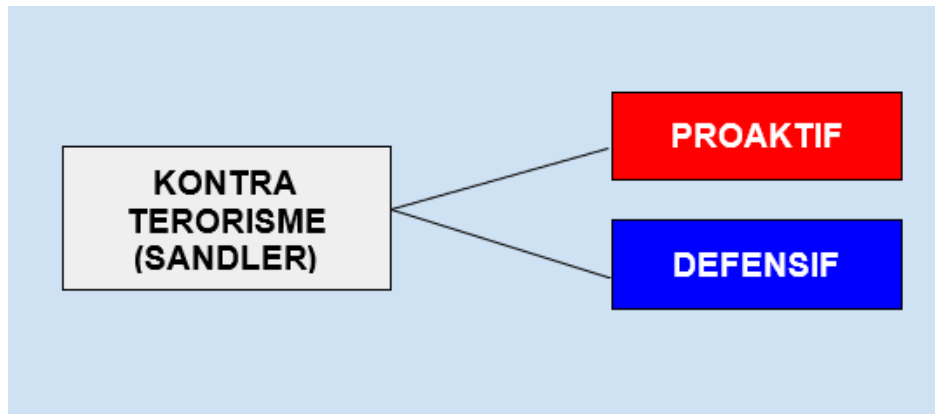
Gap dalam ketiga jurnal diatas adalah hanya membahas strategi yang digunakan Uni Afrika dalam kerjasama *Internasional African Led International Support Mission In Mali* (AFISMA) dan dalam penelitiannya tidak menyoroti strategi apa yang dibentuk setelahnya. Dalam penelitian saya menyoroti adanya peningkatan jumlah serangan terorisme pada tahun 2013 hingga 2023 yang

mengharuskan adanya pembaruan strategi yang efektif. Oleh karena itu, perlu melihat apa saja tindakan Uni Afrika sebagai organisasi regional melalui beragam upaya kontra terorisme dengan tujuan yang lebih luas dalam mencakup keamanan dan stabilitas di wilayah Mali di tahun 2013 hingga 2023.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penulis menganalisis upaya kontra terorisme Uni Afrika dengan menggunakan teori kontra terorisme dari jurnal “*Collective versus Unilateral From Responses to Terrorism*” karya Todd Sandler tahun 2005. Dalam tulisannya Sandler tersebut menjelaskan bahwa terorisme merupakan ancaman dengan menggunakan tindakan kekerasan secara terencana oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan politik atau sosial dengan cara mengintimidasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Teroris mencoba untuk menghindari proses politik yang normal sehingga dengan melalui kekerasan yang dilakukan terhadap masyarakat agar menekan pemerintah untuk menyetujui tuntutan teroris. Menurut Sandler, tindakan kontra terorisme dilakukan sebagai respon dari aktor negara yang bisa diterapkan dalam organisasi internasional karena tindakan yang diberikan bertujuan sama untuk mengatasi segala ancaman yang dapat mengancam stabilitas politik, ekonomi dan sosial sebuah wilayah. Menurut Sandler, terdapat dua tindakan kontra terorisme yang efektif diterapkan di negara-negara, yaitu tindakan Proaktif dan Defensif.

Gambar 1. Konsep Kontra Terorisme oleh Sandler



Sumber: Todd Sandler (2005).

Tindakan proaktif merupakan langkah penanganan secara langsung atau aktif dalam melawan kelompok teroris. Dalam penerapan proaktif akan bertindak secara langsung menargetkan kelompok terorisme, sumber dana, dan para simpatisan kelompok tersebut. Biasanya tindakan ini menjadi respon awal dari aktor-aktor nasional maupun internasional yang terlibat ketika menghadapi kelompok teroris dengan cara, memerangi kelompok tersebut, menyerang atau membakar markas teroris, menghentikan sumber dana dari sponsor dalam negeri maupun asing, menyusup ke dalam kelompok dan mengumpulkan data intelijen. Tujuan dari tindakan tersebut untuk melemahkan dan menghentikan aktivitas teroris untuk beroperasi. Terorisme memiliki motif yang jelas untuk menyerang negara-negara yang menerapkan langkah-langkah proaktif (Sandler 2005).

Tindakan kedua defensif merupakan langkah untuk melindungi target yang menjadi sasaran potensial kelompok teroris. Biasanya langkah defensif selalu melibatkan teknologi, seperti detektor logam, identifikasi biometrik, dan pendeteksi bom. Kemudian langkah lainnya dengan memperkuat kelembagaan anti terorisme

polisi dan militer. Walaupun, tidak menutup kemungkinan akan ada serangan balas dari kelompok teroris. Setidaknya dapat mengurangi resiko ancaman dari kelompok teroris aksi karena biaya operasional kelompok tersebut tentunya akan meningkat, strategi defensif ini berusaha untuk menghalangi terorisme untuk memperoleh target atau keuntungan dari setiap aksi serangannya. Dengan demikian tindakan defensif akan membuat kondisi negara menjadi lebih aman (Sandler 2005).

Sesuai dengan penelitian terhadap kondisi yang sedang dihadapi Uni Afrika dalam mengatasi kelompok terorisme di wilayahnya teori ini dapat diaplikasikan dalam kontra terorisme yang dilakukan organisasi internasional, seperti Uni Afrika untuk menangani kasus terorisme di Mali dalam kurun waktu 2013-2023. Dari jurnal tersebut memberi pemahaman mengenai strategi yang tidak akan berjalan dengan baik, apabila diterapkan hanya satu konsep saja. Perlu menyeimbangkan kedua tindakan pada suatu kasus terorisme dalam negara untuk mendapatkan hasil yang efektif.

1.7 Argumen Sementara

Sebagai organisasi, regional Uni Afrika bertanggung jawab atas keamanan wilayah Afrika untuk membantu mengatasi permasalahan terorisme di Mali dalam kurun waktu 2013-2023 dengan menggunakan 2 tindakan (Proaktif dan Defensif) dari Sandler. Tindakan proaktif meliputi aksi yang menargetkan kelompok terorisme dan sumber dana secara langsung, dalam kasus Uni afrika meluncurkan beberapa strategi baru yang dalam aksinya untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok-kelompok terorisme di wilayahnya. Kemudian melakukan koordinasi rutin dengan para petinggi keamanan wilayah dan badan intelijen untuk

membahas tantangan terbaru dan mengumpulkan informasi rahasia. Sedangkan tindakan defensif atau melakukan perlindungan dan mengantisipasi serangan yang akan timbul dengan memperkuat kapasitas militer dan menjalankan rekomendasi upaya-upaya preventif dalam pemberantasan terorisme dari lembaga African Center Study Research on Terrorism Kemudian melakukan koordinasi rutin dengan para petinggi keamanan wilayah dan badan intelijen untuk membahas tantangan dan strategi kerjasama regional.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dalam kasus ini. Tujuan dari penelitian kualitatif untuk menjelaskan fenomena-fenomena dan isu permasalahan secara menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan secara deskriptif, khususnya dalam menganalisis studi kasus ini menggunakan metode kualitatif yang mengambil data dari sumber literatur (Walidin, Saifullah and Tabrani 2015, 77)

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Uni Afrika yang berperan sebagai organisasi regional. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah strategi Uni Afrika dalam mengatasi kelompok terorisme AQIM di Mali pada tahun 2013-2023 yang akan ditinjau melalui perspektif kontra terorisme.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan metode pengumpulan dari data sekunder yang pada umumnya diambil dari buku cetak yang berbentuk fisik maupun

elektronik, jurnal, web, artikel yang semuanya sudah teruji kredibilitas dan tervalidasi faktanya.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian ini akan diawali dengan mengumpulkan data-data yang sesuai dengan permasalahan terorisme yang berada di Mali yang bersumber dari literatur seperti jurnal internasional, buku dan artikel dari internet. Setelah itu, Penulis akan mengidentifikasi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Kemudian, apabila semua data sudah lengkap, penulis akan menyusun analisis terkait upaya yang telah dilakukan Uni Afrika terhadap kelompok terorisme AQIM di Mali.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini akan menjadi 4 bab utama, yaitu:

- **Bab 1:** Berisi tentang pendahuluan seperti, latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, hingga metode pengumpulan data.
- **Bab 2:** Berisi mengenai pembahasan permasalahan aksi-aksi terorisme yang terjadi, bagaimana respon pemerintah Mali dan upaya apa saja yang telah dilakukan Uni Afrika.
- **Bab 3:** Berisi analisis mengenai penerapan upaya yang dilakukan Uni Afrika kemudian disesuaikan dengan konsep Kontra Terorisme dari Todd Sandler.
- **Bab 4:** Bagian ini berisi penutup, yang akan merangkum hasil dari seluruh penelitian lalu dirumuskan menjadi kesimpulan dan penutup penelitian.

BAB 2

PERMASALAHAN TERORISME DI MALI

Ketidakpuasan rakyat terhadap pemimpin menyebabkan pemberontakan di Mali, situasi ini telah melanda negara itu beberapa kali sejak kemerdekaan. Seperti yang sudah oleh pemberontakan di Mali, militansi Islam mengikuti pola yang berbeda. Setelah kemerdekaan Mali, suku Tuareg yang terdiri dari banyak kelompok pemberontak separatis, melancarkan pemberontakan berturut-turut terhadap pemerintah pusat dari tahun 1960 hingga 2015. Melihat kondisi yang menguntungkan tersebut kelompok teroris AQIM bergabung bersama kelompok separatis untuk melawan pemerintah yang berkuasa, dan kemungkinan meluasnya kelompok tersebut di kawasan tersebut dan sekitarnya, memaksa masyarakat internasional untuk campur tangan di Mali. Di kawasan tersebut, sebagian besar konflik terkait dengan ketidakpuasan penduduk terhadap pemerintah mereka. Ditambah dengan tingginya tingkat korupsi oleh kalangan para petinggi di kawasan tersebut, aksinya memaksa beberapa warga biasa untuk menuntut hak-hak mereka melalui dukungan kepada kelompok separatis dan teroris. Berikut berupa kelompok pemberontak serta aksi-aksi terorisme di Mali yang berdampak sangat buruk pada wilayah Mali.

2.1 Kelompok Al-Qaeda Islam in the Islamic Maghreb

Al-Qaeda merupakan kelompok terorisme yang dipimpin oleh Osama Bin Laden pada tahun 1988. Awalnya mereka hanya beroperasi di wilayah konflik di timur tengah kemudian semakin berkembang setelah peristiwa serangan 2011 di

Amerika (Fanny Angelia 2013). Hingga tahun 2023 terdapat 16 operasi, termasuk Al-Qaeda in Iraq yang telah berganti nama menjadi ISIS, Al Shabaab, Jabhat al Nusra dan the Islamic Emirate of the Caucasus. Sebelum menjadi AQIM, kelompok tersebut bernama Groupe Salafiste Pour La Predikasi et le Combat (GSPC) kemudian setelah mengirim personel anggotanya ke wilayah Al-Qaeda Afganistan untuk melaksanakan pelatihan dan aksi kriminal. Akhirnya pada 2007 setelah kembali dari Afganistan, mereka memutuskan untuk mengganti nama Al-Qaeda Islam Maghreb (Laurent de Castelli 2014).

AQIM menggunakan prinsip salafi jihad yang berdasarkan dari pemikiran Sayyid Qutb sesuai dengan landasan spritual kelompok Al-Qaeda, yang dimana memadukan keyakinan berjihad dengan fokus regional dalam menguasai wilayah Maghreb hingga Semenanjung liberia (Fanny Angelia 2013). AQIM Memiliki tiga tujuan utama. Pertama ingin melengserkan pemerintah Aljazair, kemudian membuat sebuah tempat perlindungan bagi suku Tuareg yang berada di Mali, Mauritania dan Niger. Agar mereka dapat dukungan untuk melakukan perlawanan pada pemerintah yang sedang berkuasa pada negara tersebut. Terakhir, melakukan pengeboman di negara-negara eropa, seperti Spanyol, Perancis, Spanyol, Belgia dan Inggris (Laurent de Castelli 2014).

Kapasitas pasukan AQIM sendiri memiliki 3000 personil yang siap melawan tentara Mali. Kebanyakan personel dari kelompok mereka berasal dari etnis Arab dan militan asing. Saat bertempur melawan pasukan Mali, mereka akan digabung dengan pasukan terorisme lainnya, seperti Ansar Al-Dine dan MUJAO. Daerah operasi AQIM begitu luas untuk operasi utara dari bagian timur Aljazair hingga ke daerah Kabylie yang berbatasan dengan Tunisia. Sedangkan operasi

Selatan berpusat pada wilayah Utara di Mali, Tenggara Mauritania, Niger Barat, Aljazair Selatan dan Libya.

Salah satu kekuatan dari masifnya aksi penyerangan kelompok AQIM bersumber dari dana yang didapatkan dari kegiatan kriminal atau kejahatan di wilayah Afrika, seperti penculikan warga asing dengan meminta tebusan yang sangat tinggi. terbukti setelah mendapatkan uang penculikan, mereka menggunakan untuk melakukan aksi teror. Salah satu contohnya, pada tahun 2016 terjadi penculikan seorang politisi Mali Soumaila Cisse serta 2 warga asing yang berasal dari Italia dan Prancis yang saat itu sedang mengikuti kampanye parlemen di Bamako, mereka semua disandera oleh kelompok afiliasi AQIM. Kemudian pada tahun 2020, pemerintah berhasil negosiasi dengan AQIM hingga mencapai kesepakatan USD 11,8 juta untuk pembebasan 4 sandera (BBC 2020).

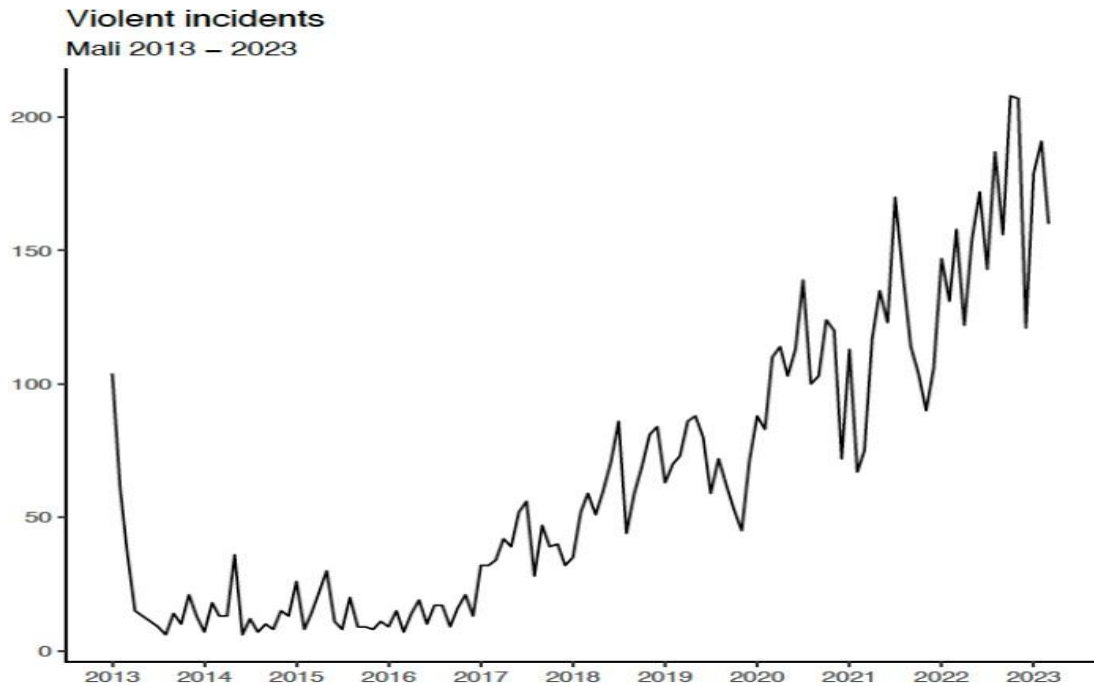
Sumber kedua berasal dari jalur pengiriman narkoba yang berasal dari Amerika Selatan menuju Eropa, perlu melewati daerah Afrika Barat untuk menjadi tempat transit. Pengiriman tersebut membawa sebanyak 35 hingga 40 ton obat-obatan terlarang di setiap tahunnya dengan total keuntungan sebesar USD 1,2 miliar. Kemudian, jalur ilegal yang ditempuh para kurir narkoba harus melewati wilayah AQIM dengan konsekuensi membayar pajak perlindungan selama melintas (Luna 2014). Biaya pajak perlindungan yang dikenakan oleh AQIM memiliki keterkaitan dengan jumlah peningkatan barang-barang ilegal. Hal tersebut dibuktikan setelah militer maroko melakukan penangkapan mobil truck narkoba yang sebelumnya membayar 50 ribu USD di wilayah AQIM. Keterlibatan AQIM dalam pengedaran narkoba bisa dibuktikan pada kasus yang terjadi pada tahun 2015, ketika 9 orang yang terafiliasi oleh AQIM tertangkap sedang melakukan

penjualan narkoba di negara asing. Selain itu, berasal dari penjualan senjata ilegal yang mana dana tersebut didapatkan dari hasil penjualan narkoba atau mengambil secara ilegal dari negara lain. Bukti tersebut dapat dibuktikan saat melakukan operasi ke dalam sebuah gudang senjata ringan hingga berat yang terverifikasi milik AQIM. Kemudian tim keamanan menemukan sebuah kendaraan yang berisi 640 KG bahan peledak dan 435 detonator. Ditahun yang sama menemukan 30 senjata kalashnikov dan 2 granat berpeluncur tank anti peluru (Theodore Kouts 2019).

2.2 Ragam Aksi Pemberontakan Terorisme di Mali

Dari tahun 2013 hingga 2023 negara Mali menghadapi kebangkitan kelompok teroris serta meningkatnya kekerasan dalam bentuk serangan antaretnis di dalam komunitas maupun serangan teroris yang dilakukan terhadap pasukan militer. Sejak tahun 2013 serangan terorisme semakin meningkat di Mali yang disebabkan oleh AQIM dan afiliasinya (Melanie Sauter 2024). Pada tahun tersebut terjadi lonjakan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya, pada tahun 2012 hanya terjadi dibawah 100 insiden kemudian menjadi lebih dari 130 insiden terorisme (Melanie Sauter 2024). Salah satu faktor yang menyebabkan kuatnya serangan dari kelompok AQIM adalah koalisi dengan kelompok separatis dari Tuareg dan beberapa kelompok ekstrimis lainnya (Ansar Dine dan MUJAO). Mereka terlibat dalam melakukan serangan-serangan yang ditujukan pada pusat kota Mali dan markas militer.

Gambar 2. Grafik Aktivitas Kelompok Terorisme AQIM 20213-2023



Sumber: Melani Sauter (2024)

Sebagian besar penyerangan tersebut mereka menargetkan pasukan MINUSMA, Mali dan Perancis. Dari serangan ledakan yang diluncurkan pada tahun 2014 oleh pasukan terorisme mengakibatkan lebih dari 100 orang terluka pada pasukan keamanan dan tewasnya 19 personel MINUSMA, biasanya aksi brutal tersebut menggunakan roket, mortir, ranjau darat, dan bom bunuh diri. Serangan terus diluncurkan dari kelompok teroris AQIM di sebuah hotel Radisson Blu di Bamako (ibu kota Mali), mereka menyandera 170 tamu dan personel hotel di tahun 2015 (BBC 2015). Sebelumnya, sejumlah korban berasal dari tamu hotel hadir untuk melakukan agenda konferensi tentang penanggulangan ekstremisme kekerasan. Sebagian tamu asing lainnya dari personel Air France, Turkish Airlines, staf kedutaan Amerika, dan sejumlah pengusaha Tiongkok dari serangan tersebut menewaskan 21 orang (BBC 2015). Serangan yang masif dilakukan

kelompok Tuareg, AQIM dengan aliansi Ansar Dine dan MUJAO yang terus melancarkan serangan teroris dan penculikan yang menargetkan pasukan militer internasional, militer, dan masyarakat sipil Mali. Konflik semakin meluas ke wilayah Selatan di tengah keterbatasan sumber daya, dan kurangnya tata kelola yang efektif mengakibatkan peningkatan signifikan dalam kekerasan antar komunitas. Upaya untuk mengamankan pusat negara juga jadi terhambat karena terbatasnya anggota militer Mali yang terlatih terhadap serangan teroris yang semakin canggih. Beberapa serangan terus berlanjut dengan menargetkan militer Perancis dan Mali.

Pada tahun 2018 Kelompok afiliasi AQIM kembali meledakan bom di GAO, dengan menargetkan patroli Prancis, namun serangan meleset mengenai warga sipil. Korban yang tewas karena ledakan berjumlah 4 orang sedangkan 4 orang lainnya dari militer Prancis hanya luka-luka. Serangan tersebut bukan semata-mata hanya untuk menciptakan rasa takut masyarakat saja melainkan ada pesan terselubung kepada presiden Prancis Emmanuel Macron saat mendekati acara KTT Uni Afrika (VOA 2018).

Kemudian pada tahun 2019 kelompok teroris kembali melakukan serangan brutal pada 2 markas militer yang berada di Boulkessi dan Mondoro. Serangan tidak terduga tersebut dianggap canggih karena tidak terdeteksi oleh militer. Korban yang tewas mencapai 38 orang. Tidak hanya itu, mereka menyandera 2 personel dan mengambil 5 kendaraan, 76 senapan, dan 2 peluru mortir dengan amunisinya (Antara 2019).

Lalu pada tahun 2021, militer Prancis kembali lagi menjadi korban atas serangan bom yang diluncurkan kelompok teroris di kawasan timur laut Mali.

Kendaraan patroli yang sedang ditumpangi militer Prancis terkena ledakan dan menewaskan 2 orang personel (Rita Uli Hutapea 2021). Kekurangan dalam sektor keamanan telah memberikan keuntungan bagi kelompok terorisme AQIM untuk kembali melakukan serangan dari bulan Januari hingga November dengan jumlah yang tewas selama serangan 172 orang dan 41 lainnya terluka, sebagian besar yang menjadi korban adalah tentara MINUSMA, militer Mali dan warga sipil, banyak serangan mematikan dari kelompok teroris terus berlanjut hingga tahun 2020 ke wilayah Mopti dan Segou (International Crisis Group 2022).

Pada tahun 2022 kelompok AQIM kembali melakukan penyerangan ke militer selama satu dekade terakhir. Saat pagi sebelum adanya serangan ledakan, AQIM sudah melakukan penyerangan di markas Kati. Mereka menargetkan sebuah konvoi yang membawa kepala Junta Mali, Kolonel Assimi Goita. Akibat dari serangan tersebut ada 7 militer yang tewas dan 6 orang luka-luka. Sedangkan dari pihak teroris, terdapat 7 orang yang tewas dan 8 orang ditangkap. Selain itu, kasus terorisme terjadi di tahun yang sama. Kelompok teroris afiliasi AQIM mendatangi desa Diallasagou dan desa sekitar Bankass. Mereka melakukan penyerangan secara brutal terhadap warga dengan jumlah korban yang tewas lebih dari 100 jiwa. Selain melakukan penyerangan, mereka mencuri ternak-ternak membakar gubuk dan rumah milik warga (Pri Saja 2022).

2.3 Respon Pemerintah Mali Terhadap Aksi Pemberontakan Terorisme

Dalam menyikapi aksi kudeta dan terorisme yang semakin menyebar di wilayah Mali dan tentunya hal ini dapat berdampak pada kawasan lainnya. Sehingga permasalahan terorisme menjadi perhatian serius bagi pemerintah,

berikut respon dari pihak pemerintah:

2.3.1 Pemerintah Mali

Kasus terorisme yang semakin meningkat membuat para pemerintah melakukan pendekatan secara militer di setiap daerah. Hal ini sudah biasa dilakukan sejak tahun 1963 terkait keputusan untuk memberlakukan darurat militer di wilayah utara, dan terus berlanjut hingga tahun 2012. Beberapa upaya yang diterapkan dan telah melibatkan pihak lokal hingga internasional.

Inisiatif pemerintah pertama dengan menandakan pertama dengan mengadakan perjanjian di tahun 1991 yang menghasilkan penghentian permusuhan antara pemerintah Mali dengan kelompok separati Tuareg (Catherine Barnes 2002). kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan semua operasi militer di Mali, khususnya di wilayah Timbuktu dan Gao. Kemudian respon kedua dengan mengadakan pertemuan untuk melakukan penandatanganan Pakta Nasional pada tahun 1992.

Isi dokumen menyatakan untuk mengakhiri permusuhan dan memberikan status khusus kepada wilayah utara Mali, inti dalam perjanjian tersebut memberikan langkah-langkah penyelesaian konflik yang diharapkan segera dimulai namun, pelaksanaan langkah-langkah ini tertunda, termasuk integrasi para pejuang dari pemberontak ke dalam angkatan bersenjata Mali yang bersifat sukarela (Catherine Barnes 2002). Integrasi tersebut bersifat sukarela tidak memaksa secara personal. Dalam Pakta Nasional, pemerintah Mali menyetujui skema pembangunan khusus selama dekade berikutnya. Tujuan dari rencana tersebut adalah untuk menyeimbangkan ketimpangan ekonomi antara wilayah

Utara dan Selatan dengan tujuan tambahan untuk meningkatkan infrastruktur dan menarik investor. Setiap tahunnya program-program tersebut yang didanai oleh pemerintah pusat untuk merencanakan proyek.

Pemerintah juga memberikan keringanan pajak untuk wilayah utara agar investor kembali tertarik. Namun, Pakta Nasional tidak membawa hasil yang efektif untuk krisis tersebut karena banyak pasal yang dilanggar dan tidak dilaksanakan. Meskipun Pakta tersebut terus diterapkan hingga tahun 2006 mulai muncul pemberontakan baru di Mali utara, namun berhasil diselesaikan oleh pemerintah dengan menandatangani perjanjian khusus pembangunan untuk wilayah Kidal (Pezard and Shurkin 2015).

Pada tahun 2014 ditengah penyebaran kelompok teroris, respon untuk memperkuat kapasitas keamanan pemerintah membentuk tentara Pro Pemerintah atau dikenal dengan Plateforme yang anggotanya berasal dari kelompok pejuang lokal *Groupe Auto-defense Touareg Imaghad et Allie (GATIA)*, *MAA-Ahmed*, *de Peuple de l'Azawad (CPA)* dan *Coordination des Mouvement et Front Patriotique de Résistance (CMFPR1)* dibentuk dengan tujuan mendukung pemerintah pusat dalam membela kepentingan komunitas masa depan, seperti bantuan kemanusiaan, proses pelucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi ke dalam lembaga pemerintah atau militer, terakhir tentunya membantu memerangi kelompok teroris di sepanjang perbatasan Mali hingga Niger (RFI 2016).

Inisiatif dari pemerintah tidak selalu berjalan lancar justru banyak wilayah utara yang jatuh ke tangan pemberontak dan teroris. Akhirnya pada tahun 2013 banyak masyarakat internasional yang melakukan intervensi di Mali utara karena kelompok separatis dan teroris telah menguasai dua pertiga wilayah negara

tersebut. Akhirnya Uni Afrika dan ECOWAS memulai intervensi dengan dukungan PBB.

2.4 Respon Organisasi Internasional Terhadap Aksi Terorisme

Melihat kasus terorisme semakin meningkat hingga berpotensi melampaui batas negara ditengah ketidakstabilan politik di Mali, salah satu faktornya karena kudeta militer. Kondisi ini sangat diperlukan bantuan dari pihak luar atau organisasi internasional dalam menyusun strategi yang efektif untuk menekan penyebaran terorisme yang semakin luas.

2.4.1 Organisasi Internasional

Respon pertama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa langsung mengerahkan pasukan-pasukan internasional ke Mali untuk mengawal misi MINUSMA di tahun 2013 atas permintaan Pemerintah Mali. Misi militer ini membantu negara Mali untuk menaklukkan wilayah yang dikuasai teroris. Namun, PBB belum bisa memberi keputusan yang cepat dan perlu meninjau negara Mali (detikNews 2013).

Pemerintah yang sedang masa transisi kembali berharap bantuan PBB dalam penentuan kejahatan perang dan kejahatan terhadap manusia, penangkapan para pelaku kejahatan tersebut di Mali utara. Setelah permintaan ini, kelompok teroris memperluas target ke Mali selatan, khawatir perluasan daerah serangan ini kemudian membuat masyarakat internasional memutuskan untuk campur tangan di Mali.

Organisasi internasional PBB mulai meluncurkan misi gabungan dengan Uni Afrika. Dimulai dari *African International Support Mission to Mali*

(AFISMA). Dibentuk dengan mandat membantu Mali untuk memulihkan keamanan wilayahnya dari kelompok teroris dan mengkonsolidasikan otoritas negara. Badan ini juga ditugaskan untuk mendukung pihak pemerintah dan aparat negara Mali dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi lembaga yang menyalurkan bantuan kemanusiaan dan memulangkan secara sukarela para pengungsi.

Kemudian pada tahun 2013 Uni Eropa mengadakan program pelatihan European Union Training Mission yang diluncurkan atas permintaan pemerintah Mali untuk meningkatkan kemampuan militer Mali. Terdapat 22 negara Uni Eropa berpartisipasi dalam *Europe Union Training Mission* (EUTM) dengan jumlah 500 personel yang ahli dalam bidang instalasi sistem keamanan untuk melatih 26 resimen yang berjumlah 17000 personel tentara Mali (Galantino and Freire 2015). Tujuan utama dari EUTM untuk memberikan masukan kepada Kementerian Pertahanan dan militer Mali, dan memberikan pendidikan dan pelatihan militer kepada MAF dalam rangka mendukung otoritas Mali untuk mencapai militer yang mandiri dan mampu berkontribusi pada pertahanan wilayah dan perlindungan bagi penduduk Mali (Emma Skeppström, Cecilia Hull Wiklund, and Michael Jonsson 2014). Selain program penguatan eksternal militer, Uni Eropa meluncurkan program pelatihan internal untuk bagian keamanan internal, seperti polisi dan pasukan cadangan militer. Selain itu, pelatihan tersenut untuk mereformasi sektor keamanan dan memulihkan legitimasi negara Mali dengan meningkatkan kemampuan pada keamanan pemerintah.

PBB mulai melanjutkan kembali Misi Stabilisasi Terpadu Multidimensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (MINUSMA) di Mali pada tahun 2014. Tujuan dari

misi tersebut antara lain untuk mendukung kembalinya demokrasi di Mali, melaksanakan misi stabilisasi, memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan, melindungi hak asasi manusia, Berpartisipasi dalam perluasan kewenangan negara di bagian utara, menyiapkan pemilu yang bebas, inklusif, dan damai, melakukan operasi sepihak atau operasi bilateral dengan pasukan pertahanan dan keamanan Mali.

Pada tahun 2013 Negara Perancis juga turut memberi respon aktif dalam meluncurkan beberapa operasi militer atas permintaan pemerintah Mali. Melihat kelompok teroris AQIM yang sudah menguasai kota Konna dan semakin bergerak ke wilayah selatan mendekati kota Mopti (Dan E. Stigall 2015). Sebelumnya pemerintah Perancis telah menarik pasukan militernya setelah kemerdekaan negara Mali. Tetapi saat kondisi mendesak yang sedang terjadi, Presiden sementara meminta bantuan intervensi dari Prancis. Melihat kelemahan dari pertahanan Mali, akhirnya Prancis sepakat bergerak secara ofensif dengan mengerahkan 4.000 personel untuk menghadapi kelompok teroris melalui operasi Serval berjalan lancar dan berhasil dalam menahan pergerakan teroris ke wilayah selatan (Hassan Ould Moctar 2022). Setelah keberhasilan dalam mencegah pergerakan teroris, Perancis kembali meluncurkan operasi militer Barkhane yang cakupannya lebih luas dari misi sebelumnya. Presiden Prancis kembali mengirim 5.500 personel ke wilayah Burkina Faso, Mali, Chad, Niger, dan Mauritania (Reuters 2019). Operasi tersebut berjalan selama 7 tahun hingga berakhir pada tahun 2022 setelah peristiwa kudeta yang terjadi di Mali (Nur Aini 2022).

2.4.2 *Uni Afrika*

Melihat stabilitas negara Mali sedang mengalami ancaman serius dari

terorisme dan aksi kudeta militer. Komisi Uni Afrika, Peace Security Council, dan negara-negara anggota yang menjadi badan bertanggung jawab atas penyusunan strategi strategi kontra terorisme di wilayah Afrika. Uni Afrika memulai kolaborasi bersama negara anggotanya untuk menyusun kerangka kontra terorisme guna memperkuat kapasitas keamanan dalam memerangi kelompok terorisme. Diawali dengan misi bantuan militer AFISMA yang diluncurkan pada tahun 2013 untuk membantu militer Prancis dalam operasi-operasi militernya di Mali, kemudian menjadi tempat untuk memfasilitasi pertemuan intelijen yang sangat berfungsi untuk berbagi informasi penting mengenai teroris. Selain itu, Uni Afrika melakukan kerjasama dengan organisasi internasional, seperti PBB, UNMAS, dan ECOWAS untuk mengatasi permasalahan krisis di Mali. Uni Afrika juga melakukan penerapan strategi kontra terorisme yang berdasarkan riset dari ACSRT sesuai dengan prinsip subsidiaritas di Afrika yang mengharuskan negara-negara anggota untuk merespons situasi krisis di wilayah berdasarkan kedekatan budaya, strategi, dan geopolitik krisis tersebut.

2.5 Peran Penting Uni Afrika dalam Kontra Terorisme Mali

Uni Afrika sebagai organisasi Internasional yang memiliki tanggung jawab secara legitimasi di wilayahnya untuk mengurangi adanya kesan intervensi asing dalam menangani konflik sehingga masyarakat lokal mendukung secara penuh dan memudahkan untuk melakukan koordinasi dengan negara anggotanya dalam merespon ancaman pada wilayahnya. Kemudian Uni Afrika memiliki lembaga khusus ACSRT yang memiliki fokus dalam menganalisis meneliti dan mengkaji konflik dan krisis di wilayah Afrika. Bila dijalankan secara efektif akan

membantu mewujudkan Rencana Aksi AU tahun 2004 untuk menciptakan kawasan yang kondusif menjadi kenyataan (Martin Ewi and Kwesi Aning 2006). Kemudian telah melakukan beberapa kolaborasi bersama PBB terkait mekanisme penanganan dan pendanaan serta bidang lain yang mampu memperkuat sistem organisasi.

Peran penting Uni Afrika melakukan beragam respon kolektif bersama organisasi internasional PBB seperti kerjasama dalam menangani permasalahan bom rakitan dan ranjau di Mali melalui program edukasi dan aksi pembersihan lapangan. Kemudian mereka melakukan kolaborasi lokakarya dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran negara dari ancaman, dan melakukan praktik perlindungan target yang rentan di Mali. Selain dengan organisasi internasional, mereka melakukan diplomasi militer dengan negara-negara regional dan internasional dalam operasi militer, seperti saat melakukan kerjasama dengan negara Prancis dalam melakukan penyerangan terhadap markas kelompok teroris dalam operasi Serval. Kemudian Uni Afrika mendorong negara Mali dan Burkina Faso untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok AQIM di wilayah perbatasan.

Kemudian Uni Afrika memiliki peran penting dalam memfasilitasi pertemuan intelijen yang pada wilayah Sahel yang sangat penting dalam mengawasi pergerakan dan mencari informasi terkait lokasi yang dibutuhkan dalam mencari petinggi kelompok teroris AQIM. Selain memfasilitasi pertemuan intelijen, mereka membantu untuk mengadakan pertemuan dengan tim penganalisis keuangan dari negara-negara Afrika untuk melacak sumber pendanaan yang dialirkan ke kelompok AQIM. Selain itu Uni Afrika memiliki

langkah-langkah preventif untuk memberikan perlindungan kawasan melalui pelatihan otoritas keamanan Afrika. Uni Afrika lainnya terletak dalam menggali informasi rahasia melalui pembagian intelijen kepada negara-negara anggota agar mengetahui pergerakan kelompok teroris di wilayah Afrika. Disisi lain, Uni Afrika memiliki pemahaman yang jauh lebih baik sebagai organisasi internasional yang paham mengenai kondisi atau dinamika sosial, politik dan etnis di Mali. Pemahaman tersebut digunakan untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk membantu pemerintah dalam mengatasi kelompok teroris (Mensah 2023).

BAB 3

UPAYA KONTRA TERORISME UNI AFRIKA TERHADAP KELOMPOK TERORISME DI MALI 2013-2023

Pada Bab 3, Penulis akan membahas macam-macam upaya Uni Afrika dalam mengatasi kelompok kontra terorisme Tuareg di Mali pada kurun waktu 2013-2023 dengan teori kontra terorisme dari jurnal yang berjudul “*Collective versus Unilateral From Responses to Terrorism*” karya Todd Sandler tahun 2005 yang terbagi menjadi 2 sub bab. Sub bab pertama akan membahas upaya Proaktif. Sub bab terakhir akan membahas tindakan Defensif sebagai upaya terakhir yang dilakukan Uni Afrika.

3.1 Upaya Proaktif Kontra Terorisme oleh Uni Afrika

Tindakan proaktif yang menargetkan secara langsung terhadap teroris, sumber daya mereka, atau pendukung mereka secara langsung. Dengan melemahkan kemampuan teroris untuk beroperasi, tindakan proaktif mengurangi frekuensi serangan terhadap semua target yang berisiko dengan cara menyerang markas teroris, membunuh para pemimpin teroris, melacak sumber aset teroris, mengumpulkan informasi intelijen, dan menyusup ke dalam kelompok teroris (Sandler 2005).

3.1.1 *Penyerangan Terhadap Markas Teroris dan Membunuh Pemimpin Teroris*

Negara Mali mengalami krisis keamanan karena aktivitas yang dilakukan kelompok terorisme AQIM dan kelompok separatis Tuareg di wilayah Utara. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengancam stabilitas negara dan keamanan regional. Akhirnya pada tahun 2013, Uni Afrika mengadakan Konferensi Donor ke 20 yang diadakan di Addis Ababa dan disahkan oleh PBB (Peace and Security Council of the African Union 2013). Dalam acara tersebut diresmikan sebuah misi *African led Support Mission In Mali* (AFISMA) mereka melakukan peresmianya dengan menghadirkan semua presiden dari wilayah Afrika dan beberapa perwakilan dari negara-negara Eropa dan Asia. Diharapkan misi tersebut Uni Afrika dapat melakukan negosiasi dengan kelompok Tuareg agar tidak menjalin koalisi dengan AQIM.

Tujuan utama dari misi AFISMA untuk membantu pasukan militer Mali dan Prancis melawan kelompok teroris AQIM yang sedang masifnya melancarkan serangan terhadap pemerintah untuk memperluas wilayah kekuasaan. Kemudian membebaskan wilayah Utara yang dikuasai kelompok teroris. Lalu membentuk militer *Malian Defence and Security Forces* (MDSF) untuk menjaga stabilitas keamanan Mali dibawah kendali sipil yang demokratis. Terakhir untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan dan menciptakan lingkungan politik yang kondusif.

Sumber pendanaan misi AFISMA didapat dari negara-negara besar dan organisasi Internasional, seperti Amerika Serikat yang menyumbang USD 96 juta, Jepang menyumbang USD 120 juta untuk bantuan kemanusiaan, Uni Afrika

menyumbang USD 50 juta, Uni Eropa menyumbangkan USD 75 juta, Prancis turut menyumbangkan USD 63 juta untuk intervensi militer (Messay 2013). Jumlah pasukan yang akan diterjunkan dalam misi AFISMA terdapat 8000 personel, kemudian dari ECOWAS akan mengirim 3300 bersama 500 pasukan cadangan dan negara Chad juga mengirimkan 2250 personel (Messay 2013). Setelah kekuatan darat sudah terpenuhi, AFISMA membutuhkan kapasitas pasukan udara sebanyak 10 helikopter, 4 pesawat logistik dan pengintai serta 280 personel (Maru 2013).

Misi militer AFISMA diimplementasikan melalui operasi Serval yang dilakukan pasukan Prancis dan Chad terhadap wilayah Adrar des Ifoghas yang menjadi sarang kelompok teroris AQIM. Prancis menurunkan 1.200 personel yang tergabung dalam pasukan darat dan udara. Sedangkan negara Chad menurunkan 800 personel untuk mendampingi pasukan Prancis selama operasi. Serangan intens yang dilakukan militer Prancis selama 72 jam, sebagian 60% dimasifkan pada serangan udara (Laurent Lagneau 2013).

Dalam jangka waktu seminggu operasi ofensif tersebut berhasil menghancurkan selusin gudang senjata, 15 kendaraan berlapis baja, serta pabrik pembuatan bom rakitan. Selain itu, markas teroris berhasil dihancurkan serta 83 jihadis, serta pemimpin AQIM Abu Zeid tewas bersama pasukannya terkena serangan udara di wilayah Etagho yang menjadi tempat tersulit untuk ditaklukan. Operasi militer kedua dilakukan bersama tentara Mali dan Niger untuk menghancurkan markas militer dari kelompok afiliasi dari AQIM yang sebelumnya melakukan penyerangan dalam beberapa hari yang lalu. Misi pengintaian tersebut berhasil menemukan 15 pabrik sekaligus gudang senjata yang didalamnya berisi 4 mortir, 70 roket, 3 bom rakitan, dan 450 kg bahan peledak (Laurent Lagneau 2013).

Banyak tantangan dalam melaksanakan misi AFISMA yang disebabkan karena kurangnya dana untuk kebutuhan logistik militer sehingga saat misinya dijalankan kurang berjalan maksimal. Selain itu, tidak adanya standar seragam operasi bagi negara-negara afrika yang ikut berpartisipasi dalam misi, serta kendala bahasa yang menghambat koordinasi antar negara (Maru 2013). Hal ini tentunya berdampak bagi efektivitas misi dalam melawan kelompok teroris menjadi terbatas sehingga pada bulan Juli 2013 Uni Afrika menyerahkan kewenangannya kepada PBB (Tchioffo Kodjo 2018).

Dalam operasi militer Serval di Mali memberikan dampak yang cukup signifikan ketika berhasil menghancurkan markas AQIM yang berada di wilayah yang sebelumnya sulit ditaklukan. Dari menggabungkan kekuatan militer tersebut mereka berhasil menyisakan 500 jihadis yang sebelumnya terdapat 3000 jihadis dan beberapa petinggi teroris tewas dalam operasi Serval, bahkan beberapa gudang persenjataan dihancurkan sehingga dalam waktu sementara tersebut pergerakan teroris terhambat. Dan beberapa kota yang berada dibawah kekuasaan kelompok teroris AQIM di Mali Utara berhasil dibebaskan. Namun karena kemampuan adaptasi yang cepat dan tersembunyi mereka bangkit lagi melakukan serangan tahun setelahnya (Canadian Security Intelligency Service 2025).

Pada tahun 2016 hingga 2018 Mali kembali mengalami insiden teroris yang menargetkan warga sipil dan tentara MINUSMA. Serangan tersebut diluncurkan pada restoran, hotel, dan pangkalan militer, dengan jumlah korban mencapai 69 warga sipil dan 13 personel militer Niger (Africa Center 2018). Setelah adanya serangan besar-besaran pada tahun tersebut uni Afrika memberikan mandat keamanan pada organisasi G5 Sahel melalui misi militer yang bernama *Joint Force*

atau FC-J5S yang sebelumnya pernah diluncurkan pada tahun 2014 untuk mengatasi kejahatan lintas negara kemudian fungsinya diperluas menjadi penanganan aksi terorisme. Banyak negara-negara asing yang turut berkontribusi dalam bentuk dana dan militer untuk program G5 Sahel, seperti Perancis melontarkan dana USD 8 juta, Arab Saudi mengirimkan dana sebesar USD 85 Juta, Amerika Serikat mengirim USD 51 juta dan Uni Eropa sebesar USD 50 juta (Martin Welz 2022).

Dalam peresmian misi *Joint Force* dari G5 Sahel tersebut dihadiri Komisaris Uni Afrika dan Duta besar Aljazair Smail Chergui. Kunjungan Komisaris Uni Afrika tidak semata hanya untuk peresmian saja melainkan untuk memberikan mandat dan bertanggung jawab secara penuh dalam semua misi tersebut. Mandat keamanan dalam pasukan *Joint Force* untuk memerangi terorisme, perdagangan obat-obat terlarang dan manusia. Kemudian, berkontribusi dalam pengembalian otoritas pemerintah negara dan para pengungsi. Lalu, Memfasilitasi operasi kemanusiaan seperti mengirimkan bantuan kepada para warga yang terdampak. Terakhir, mewujudkan program pembangunan G5 Sahel (Accord 2018).

Operasi militer G5 Sahel sesuai dengan hasil dari *Concept Of Operations* (CONOP) dengan menggabungkan pasukan negara anggota. Misi militer pertama diluncurkan di perbatasan Mali, Burkina faso, dan Niger dengan nama operasi Hawbi. Dalam operasi tersebut mereka menurunkan 5000 personel yang berasal dari batalion Mali dan Burkina Faso dan terus bertambah hingga 2018 dari tim militer dan polisi yang siap bergerak melawan AQIM dan afiliasinya yang di daerah perbatasan dibawah komando Jendral Mali Didier Dacko (Edward McAllister

2017). Operasi kedua Pagnali dilanjutkan pada 2018 di boulikessi dan nassoumbu dengan tujuan untuk menghancurkan rantai pasokan dan menahan pergerakan teroris(Africa Defense Forum 2019). operasi militer Hawbi dan Pagnagli yang diluncurkan dengan tujuan untuk menghancurkan pasokan persenjataan kelompok AQIM di zona perbatasan Mali dan Burkina Faso memberikan dampak terhadap jumlah senjata kelompok AQIM, khususnya bahan peledak sehingga secara tidak langsung berhasil mengurangi kapasitas persediaan senjata yang digunakan untuk operasional kelompok AQIM dalam jangka pendek.

Dalam penguatan tindakan proaktif penyerangan markas teroris dari Sandler, yang dilakukan Uni Afrika ketiga operasi militer yang telah dilaksanakan di Mali belum diterapkan secara maksimal dikarenakan banyak terkendala pendanaan maupun logistik sehingga hanya memberikan dampak yang sementara. Bila diterapkan secara maksimal dengan kebutuhan militer tercukupi akan memberikan dampak yang signifikan khususnya dalam melemahkan aksi-aksi dan pergerakan dari teroris AQIM. sesuai.

3.1.2 Proses Pengumpulan Intelijen

Proses Nouakchott merupakan pertemuan rutin yang diinisiasi oleh Uni Afrika untuk mempertemukan para pimpinan tinggi intelijen kawasan Sahel setiap dua bulan sekali. Tujuan utama setiap pertemuan tersebut untuk membahas strategi kerja sama regional dalam berbagi informasi ancaman, pengawasan perbatasan, serta tantangan dalam melawan terorisme. Hasil dari pembahasan rutin tersebut diimplementasikan dalam Perjanjian Ouagadougou mengenai gencatan senjata antara kelompok separatis dan pemerintah saat

melakukan pemilihan presiden agar kegiatan berjalan kondusif dan damai di Mali (Tchioffo Kodjo 2013).

Keberhasilan yang dilakukan proses Nouakchott ini dalam perundingan damai antara Mali dengan kelompok separatis yang di mediasi Aljazair pada Juli 2014. Pada pertemuan tersebut meminta semua kelompok separatis melakukan penandatanganan dalam Perjanjian Ouagadougou untuk memisahkan diri dari kelompok teroris AQIM dan kembali berkomitmen terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Republik Mali (Tchioffo Kodjo 2015). Pada tahun 2015-2017 Proses Nouakchott berfokus pada konflik yang terjadi di Sudan Selatan sehingga fokus untuk Kelompok teroris AQIM teralihkan. Kemudian pada tahun 2018 terdapat laporan dari organisasi G5 Sahel mengenai pergerakan teroris di perbatasan Mali dan Burkina Faso. Akhirnya Uni Afrika mengirimkan beberapa intelijen untuk mempermudah pelacakan lokasi dalam operasi militer tersebut (Jonathan Doe 2018).

Saat operasi militer gabungan Bourgou IV organisasi G5 Sahel mengirim 800 personel darat. Sementara Prancis mengirim 600 personel darat untuk bergabung dalam operasi pencarian kamp teroris yang berada di wilayah Tofa Gala (Arab Weekly 2019). Saat proses pencarian alat komunikasi di rumah-rumah warga untuk melacak lokasi kamp teroris. Namun terkendala karena para warga dihadapi dua ancaman dari kedua belah pihak, kebanyakan dari warga tertutup untuk memberikan informasi. Oleh karena itu, intel diperlukan dalam keberlangsungan misi pencarian tokoh afiliasi AQIM. Ketika sudah menemukan ponsel dari seorang tersangka afiliasi kelompok teroris. Kemudian intel menyadap lokasi pesan dari pemimpin AQIM yang ternyata tidak jauh dari lokasi operasi tersebut, Prancis

langsung mengirimkan 80 personel tentara yang didukung oleh drone dan pesawat mirage 2000 ke wilayah yang menjadi lokasi pimpinan tersebut (Arab Weekly 2019). Saat penyerangan berlangsung hanya menemukan kendaraan motor dan beberapa jihadis yang bertahan. Sedangkan pemimpin kelompok tersebut sudah melarikan diri karena sudah mendapatkan informasi penyerangan tentara Prancis dari informan lokal yang sudah ditangkap (Arab Weekly 2019). Disini menunjukkan adanya peran penting intel dalam melacak lokasi pimpinan afiliasi AQIM.

Proses pengumpulan intelijen yang dilakukan Uni Afrika memiliki bermacam-macam kepentingan diluar dari kasus terorisme, yang dimana untuk keamanan politik dalam menciptakan kondisi damai dalam pemilu di Mali pada tahun 2013. Setelah terciptanya mekanisme pemilu yang kondusif di Mali membuat negara Mali kembali mendapatkan pengakuan legitimasi internasional dari negara global dan PBB yang sebelumnya dihapuskan karena aksi kudeta. Selain untuk keamanan politik, peran intel dalam operasi militer Bourgou VI sangat krusial, yang dimana lokasi dari markas dan pemimpin teroris AQIM sulit ditemukan sehingga memerlukan peran intel. Keberhasilan operasi militer tersebut terletak pada proses intel dalam mencari informasi yang berhubungan dengan kelompok tersebut. Secara keseluruhan proses Nouakchott telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam menangani proses politik hingga operasi militer. Namun, fokus dari proses Nouakchott tidak difokuskan untuk satu negara saja sehingga setelah operasi militer Mali selesai, mereka mengganti kepentingan pada tahun 2020 hingga 2023 untuk Somalia.

3.1.3 Pelacakan Sumber Dana Kelompok Terorisme AQIM

Pada tahun 2013 Uni Afrika melakukan kerjasama dengan Tim Specialized Investigation Bridge (SIB) bergerak dibawah pengawasan Jaksa Penuntut Umum dan hakim investigasi di Pengadilan Khusus atau *Specialised Judicial Court* (SJC) untuk melacak sumber pendanaan kelompok teroris. Badan penyelidik BIS memiliki 56 ahli yang sudah menerima pelatihan khusus investigasi. Saat melakukan identifikasi dana teroris, mereka mengalami kesulitan karena kelompok teroris menggunakan sistem *hawala* atau keuangan diluar sistem perbankan (FATF 2013). Oleh karena itu, Uni Afrika melakukan inisiasi dengan melakukan pertemuan dengan berbagai badan investigasi antar negara dengan setiap seminggu sekali bersama tim khusus dari Niger, Burkina Faso, Pantai Gading dan Senegal untuk berbagi informasi intelijen dalam mendeteksi aktivitas teroris. Hasil dari informasi tersebut membuahkan hasil di tahun 2016 yang dimana menunjukan terdapat beberapa aktifitas orang-orang yang dicurigai akan melakukan pengiriman dana kepada kelompok teroris di negara Mali. Dua dari tersangka sudah dilaporkan kepada kejaksaan yudisial setelah terdeteksi melakukan pendanaan di wilayah Utara. Dari penangkapapan yang dilakukan tim SIB berhasil menyita Frans CFA 24 juta atau sekitar IDR 702 juta yang akan digunakan untuk mendanai kelompok dan aksi terorisme secara internal (FATF 2019).

Proses pelacakan uang juga perlu melibatkan tim dari *Financial Intelligence Unit* (FIU) untuk menganalisis operasional berdasarkan *Suspicious Transaction Report* (STR) yang diterima. Setelah melakukan peninjauan dari FIU mengenai sumber pendanaan berdasarkan STR yang diterima dari bank dan laporan penerima dana yang mencurigakan mengalami peningkatan. Untuk memperoleh data yang

lebih valid, mereka melakukan investigasi di beberapa lembaga pemerintahan, seperti, administrasi bea cukai, direktorat perpajakan dan otoritas berwenang lainnya. Informasi dana yang mencurigakan juga didapatkan melalui informasi akan dikumpulkan lalu di analisis kemudian mengajukan data tersebut kepada pihak berwenang. Apabila terindikasi dan terbukti dalam pencucian atau pendanaan kepada kelompok teroris (FATF 2019).

Berdasarkan proses analisis yang dilakukan FIU dalam kurun waktu 2013-2018 hanya mengirimkan 20 dari 178 laporan terkait laporan dana mencurigakan kepada Jaksa Penuntut Umum (FATF 2019). Jumlah temuan dana mencurigakan yang sudah dianalisis tampak lebih rendah yang dikirimkan pada pihak Jaksa Penuntut Umum karena banyak melalui prosedur peninjauan dari pihak Jaksa. Walaupun laporan keuangan belum semuanya dikirimkan, pihak dari kejaksaan sudah merasa puas terhadap laporan analisis yang diberikan FIU. Kemudian hasil laporan dari FIU dalam melakukan penelitian sumber pendanaan teroris sudah diberikan kepada pihak berwenang di Mali pada bulan Oktober 2018 (FATF 2019). Dalam proses menganalisis dana yang dicurigai mengalami kendala dari peninjauan dari Jaksa yang memerlukan waktu verifikasi lebih lama, hal ini tentunya memiliki konsekuensi bagi dana yang telah dicurigai tidak segera dibekukan, seharusnya ada koordinasi yang lebih cepat antara FIU dan pihak kejaksaan.

Pada tahun 2019 tim SIB melakukan pelacakan terhadap lembaga amal yang terindikasi berafiliasi dengan kelompok AQIM sebagai tempat penyimpanan aset dana untuk membiayai kebutuhan operasi mereka. Hal tersebut biasa mereka melakukan melalui sistem zakat di wilayah utara agar tidak dicurigai dalam oleh otoritas keamanan setempat (Theodore Kouts 2019). Aksi tersebut terbukti ketika

melakukan penangkapan seorang kurir yang membawa hasil zakat kepada sebuah lembaga amal yang ilegal menjadi sumber pendanaan kelompok teroris yang dimana hasilnya dibeli kendaraan, senjata, dan amunisi untuk digunakan pada operasi teroris di Mali, Sahel dan Niger (Theodore Kouts 2019).

Upaya proaktif dalam melacak sumber dana melalui kerjasama regional dalam melacak sumber dana AQIM yang dilakukan Uni Afrika bersama tim SIB telah memberikan hasil yang cukup penting terutama pada sistem *hawala*, dalam kasus pendanaan kelompok AQIM yang dimana berhasil mengungkap sistem zakat yang digunakan dalam memperoleh keuangan secara aman agar tidak terdeteksi oleh otoritas keamanan, dalam investigasi yang berlanjut mereka menemukan kendaraan dan persenjataan yang digunakan operasi teroris yang secara tidak langsung membantu untuk mengurangi kemampuan operasional mereka walaupun tidak sepenuhnya ancaman teroris menghilang. Sedangkan hasil kinerja FIU hanya berlangsung hingga tahun 2019 karena pada tahun 2020 negara Mali mengalami kudeta militer yang berujung pada pemblokiran akses finansial oleh ECOWAS sehingga menghambat operasional dari SIB maupun FIU.

3.2 Upaya Defensif Kontra Terorisme oleh Uni Afrika

Tindakan defensif merupakan tindakan yang dilakukan Uni Afrika dalam melindungi target potensial manusia dan negara. Biasanya langkah defensif selalu melibatkan teknologi, seperti detektor logam, identifikasi biometrik, dan pendeteksi bom. Kemudian langkah lain dengan cara memperkuat kelembagaan anti terorisme polisi dan militer (Sandler 2005). Dalam kasus ini Uni Afrika melakukan beberapa

tindakan defensif, seperti mendirikan lembaga dalam penguatan otoritas keamanan dan mengadakan program untuk melindungi masyarakat Mali dari bom.

3.2.1 Lembaga Penguatan Otoritas Keamanan

Menurut data dari indeks terorisme Global dari tahun 2013 hingga tahun 2023 wilayah Afrika sudah mengalami peningkatan serangan teroris sebesar 56 persen dengan jumlah 333 insiden dengan penyumbang kasus paling banyak terjadi di Mali dan Burkina faso (Fatma Esma Arslan 2023). Melihat ketidakmampuan pemerintah dalam menahan serangan karena ketidakstabilan politik dan kekerasan terhadap masyarakat, kelompok AQIM menjadi aktif dalam melakukan serangan teror di beberapa wilayah Burkina Faso dan Mali dengan menargetkan militer Mali dan MINUSMA. Dalam kondisi tersebut Uni Afrika berperan dalam mengatasi konflik yang berkepanjangan di Mali melalui pelatihan Amani Africa untuk memperkuat keamanan Afrika.

Program Amani Africa dibentuk untuk para otoritas keamanan maupun masyarakat sipil agar mempelajari bagaimana mekanisme dan operasi perdamaian, serta memperdalam pemahaman mengenai fungsi dari organisasi internasional Uni Afrika dan ECOWAS. Sekolah tersebut digunakan sebagai pelatihan beragam misi-misi penjaga keamanan yang tidak hanya di Mali saja melainkan di seluruh Afrika, sehingga pada saat pelatihan banyak dari negara Anggota Uni Afrika dan ECOWAS yang ikut berpartisipasi.

Sebelumnya program Amani Africa periode 1 berhasil dilaksanakan pada tahun 2010 untuk memperkuat sistem militer. Melihat keberhasilan pada kapasitas keamanan kemudian dilanjutkan pada periode 2 yang dilaksanakan pada tahun 2015

di Lohatla. Banyak beberapa negara dan organisasi regional bagian Afrika yang mengikuti Amani Africa, seperti Aljazair, Kongo, Rwanda, Mali, Ethiopia, Ghana, Lesotho, Gambia dan Nigeria. Program pelatihan dilaksanakan selama 3 minggu dengan diikuti 6.000 personel dari instansi militer, kepolisian dan masyarakat sipil (Jonathon Rees 2016). Mereka semua dipersiapkan untuk untuk menjadi pasukan African Standby Force (ASF) yang memiliki kewenangan dari Uni Afrika dalam mengintervensi suatu negara yang melakukan kejahatan perang, genosida dan pelanggaran hak asasi manusia (Messay 2015). Misi keamanan tidak hanya untuk otoritas keamanan saja melainkan multidimensional perlu melibatkan sipil untuk memenuhi 5 wilayah Afrika. Jumlah pasukan keamanan sudah mencapai target penjaga keamanan sebanyak 5.000 pasukan di setiap wilayah Afrika Barat, Timur, dan Utara (Jonathon Rees 2016).

Militer mali mendapatkan pelatihan dalam menyusun operasi militer yang efektif dalam menangani terorisme AQIM yang dimana implementasinya saat operasi gabungan bersama organisasi G5 Sahel. Pelatihan tidak hanya untuk pasukan saja melainkan untuk para Komandan mengharuskan mempelajari konsep manajemen *Command and Control System* inti dari konsep tersebut mengenai langkah komunikasi dan pengambilan keputusan yang tepat dalam mengarahkan pasukan agar target tercapai implementasi tersebut bisa dilihat ketika keberhasilan operasi Serval yang dimana pasukan Prancis dengan Chad menggunakan sistem komunikasi yang terenkripsi dalam menyerang markas AQIM dan menghindari adanya “*friendly fire*” (Amani Africa 2021).

Dampak bagi internasional dari pelatihan militer Amani Africa bisa dilihat dari pengalaman 10 tahun terakhir mereka melakukan operasi perdamaian

internasional PBB di 11 negara dan sebagai negara yang menyumbang militer paling banyak dengan total 35.000 personel dalam misi tersebut, seperti misi UNAMID di Sudan, UNMIL di Liberia, dan AMISOM di Somalia (Marsden Momanyi 2014). Penerapan misi ASF sudah berlangsung di Mali dan Republik Afrika Tengah yang dimana Uni Afrika dan ECOWAS bekerjasama mengirim pasukan menggabungkan semua elemen yang sesuai dengan sistem ASF (Jonathon Rees 2016).

Langkah lain dalam penguatan otoritas keamanan yang kedua dari lembaga ACSRT yang berfungsi sebagai forum kerjasama regional dalam menganalisis kontra terorisme di wilayah Afrika. Ditengah peningkatan konflik di wilayah sahel yang sebagian besar disebabkan oleh kelompok teroris. Oleh karena itu situasi di Mali tidak kondusif untuk memerangi teroris. Situasi politik dan keamanan yang sedang memburuk pada kawasan tersebut, sangat penting untuk menyelesaikan kebuntuan masalah internal politik dalam negeri guna mendorong respons yang lebih kuat terhadap terorisme dan ekstremisme kekerasan.

Hasil dari analisis menunjukan beberapa faktor yang menyebabkan kebuntuan dalam konflik di Mali adalah lembaga legitimasi dan keamanan (Militer, Polisi, Intelijen, Hukum) yang masih lemah. Khusus bagian legitimasi, ACSRT memberi rekomendasi agar otoritas nasional untuk terbuka terkait kekurangan dari tata kelola negara yang berdampak pada konflik. Sehingga sangat penting mengadakan dialog antar pemerintah dan komunitas lokal untuk mengetahui keluhan dan solusi permasalahan, hal ini juga dapat membantu mengurangi kecenderungan dalam bergabung atau mendukung kelompok teroris (Messay 2015).

ACSRT menegaskan peningkatan kemampuan militer tidak hanya berfokus dalam kapasitas bertempur saja melainkan harus paham mengenai bagaimana memberlakukan masyarakat lokal sesuai hak asasi manusia dan hukum humaniter. Implementasi dari rekomendasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan kolaborasi antara ACSRT dengan United Nation Office Counter Terrorism sebagai langkah penguatan sistem keamanan Mali, melalui acara lokakarya mengenai perlindungan serangan terorisme terhadap negara-negara rentan anggota Uni Afrika (UNOCT 2022).

Terdapat enam sesi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan ancaman, kebutuhan, dan praktik terkait perlindungan target rentan di Afrika. Kemudian memetakan mekanisme yang ada untuk pengembangan kapasitas, serta menginformasikan antara prioritas dan non prioritas agar tidak terjadi kesenjangan, baik dalam ranah kebijakan maupun di bidang bantuan teknis (UNOCT 2022). UNOCT mempresentasikan Program dari PBB tentang penanggulangan ancaman teroris global. Selain itu, mereka memberikan ringkasan praktik yang efektif dan lima modul mengenai “*Soft Target*” sekaligus menjadi materi dalam kegiatan tersebut (UNOCT 2022). Para pakar internasional memberikan panduan dan praktik baik tentang kerangka kerja dan praktik internasional yang mencakup penilaian risiko, ancaman, dan kerentanan. Kemudian mekanisme kerjasama antarlembaga, serta komunikasi dalam kondisi krisis yang efektif (UNOCT 2022). Disini ACSRT memaparkan mengenai ancaman teroris baru yang sedang berkembang di Mali, serta fokus Uni Afrika dalam melindungi target yang rentan di wilayah Afrika. Sesuai dengan tindakan defensif dari Sandler, yaitu memperkuat lembaga otoritas keamanan.

3.2.2 Program Pelindungan Masyarakat Dari Bom

Sejak tahun 2018 hingga 2023 Mali mengalami kondisi bahaya karena kelompok teroris yang hanya melakukan penyerangan dengan bahan peledak (bom rakitan) dalam meneror dan melawan militer di Mali. Menurut data United Nations menunjukan terdapat 1.630 Ranjau digunakan kelompok terorisme AQIM yang mengakibatkan 1.132 orang tewas dan 2.556 orang terluka, termasuk 162 personel MINUSMA menjadi korban jiwa (Yaye Nabo Sène 2023). Melihat hal tersebut, Uni Afrika melakukan kerjasama dengan UNMAS melalui program Mine Action untuk menekan angka korban yang terkena ledakan. Pilar utama keamanan regional Uni Afrika dalam Mine Action. Pertama untuk menyatukan semua elemen wilayah Afrika, kedua memberi dukungan politik bagi proses *Mine Action* dan memastikan berjalan sesuai proses keputusan Uni Afrika, PBB dan Dewan Perdamaian dan Keamanan (PSC) dalam mengatasi tantangan keamanan wilayah Uni Afrika terlibat langsung karena seringkali operasi dukungan perdamaian dan kemanusiaan tidak berjalan lancar (African Union Commission 2014).

Tujuan program Mine Action Uni Afrika dan PBB untuk mendukung negara anggota dalam mengurangi ancaman bahan peledak di Seluruh Afrika yang disebabkan oleh ranjau, senjata konvensional, alat peledak kelompok teroris. Melihat banyak bahan peledak yang dapat membahayakan masyarakat sipil perlu adanya sebuah kegiatan untuk melindungi manusia dari ancaman peledak. Karena kapasitas nasional seringkali lemah dalam situasi pascakonflik, peran Uni Afrika disini untuk mendukung kapasitas pemerintah nasional dengan memberikan bantuan termasuk melalui sistem keamanan regionalnya yang melibatkan

masyarakat sipil, dan mitra internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mitra yang berhubungan dengan program tersebut.

Rencana program *Mine Action* berupa membuat buku dan poster mengenai panduan keselamatan ranjau darat dan bahan peledak, hasilnya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman bahan yang peledak di Negara Mali dan membantu mobilisasi sumber daya menuju memberi respon tindakan. Kedua menyelenggarakan pelatihan cara aman dalam membuang peledak, memberi bantuan pada korban, dan memberi pendidikan risiko bom, kemudian memberi pengadaan peralatan untuk membersihkan ranjau dengan aman. Ketiga memberi fasilitas dukungan intra afrika di negara-negara anggota dalam mendukung operasi perdamaian. Lalu memberi rekomendasi *Troop Contributing Countries* dan *Police Contributing Countries* mengenai keselamatan. Memfasilitasi dukungan mitra internasional untuk mengantisipasi ancaman baru dalam lingkungan operasional dan pelatihan spesialis (African Union Commission 2014).

Saat pertama kali aksi kerjasama pembersihan ranjau lapangan di tahun 2018 perlu melibatkan 20 personel termasuk dari organisasi Internasional, kesekretariatan, dan LSM aksi ranjau nasional. Selain yang bertugas di lapangan sebagai pengamat hanya tim palang merah internasional. Aksi pembersihan hanya dilakukan satu bulan sekali di Bamako karena wilayah seperti Mopti dan Segou sedang rawan mengalami ledakan peningkatan dua kali lipat dari sebelumnya. Terdapat beberapa bentuk kontribusi yang dilakukan Uni Afrika, UNMAS dan Groupe de Travail de Lutte Antimines Humanitaire atau kelompok pembersih ranjau terhadap masyarakat Mali, dalam bentuk edukasi dengan mengadakan pelatihan aksi ranjau berupa memberikan pelatihan edukasi mengenai risiko bahan

peledak dan mengirimkan bantuan kepada korban dan masyarakat sipil di Mali berupa pendampingan yang berkelanjutan. Selain itu, UNMAS melakukan pengontrolan kualitas di beberapa wilayah (Gao, Kidal, Mopti, Tessalit, dan Timbuktu) memastikan mitra pada aksi ranjau internasional berjalan sesuai dengan standar internasional *International Mine Action Standards* (IMAS). Dampak dari program edukasi mengenai bahan peledak yang diberikan untuk masyarakat telah mencapai sebanyak 21,1 juta jiwa menerima manfaat di wilayah Afrika. Selain itu, pada tahun 2023 peningkatan pada sekolah yang mengintegrasikan pendidikan mengenai perlindungan terhadap bahan peledak ke dalam kurikulum sebesar 36% yang sebelumnya pada tahun 2018 hanya mencapai 30% (MINUSMA 2023).

Kemudian kontribusi dalam mendukung otoritas nasional untuk mengelola ledakan dan mengembangkan fasilitas militer. UNMAS memberikan dukungan kepada pemerintah untuk mengembangkan kapasitas teknis dan operasional dalam mengelola ancaman bahan peledak menggunakan cara yang aman. Selalu melakukan koordinasi terkait penyediaan pelatihan, peralatan khusus dan dukungan teknis dalam mendampingi personel Malian Defense and Security Force, serta melakukan konsultasi kepada otoritas Mali untuk mengatasi persebaran senjata ilegal. Agar operasi lebih aman bagi militer Mali dan MINUSMA, sangat penting untuk memastikan pasukan penjaga perdamaian MINUSMA menjalankan operasi aman sesuai standar internasional. Oleh karena itu, UNMAS mengadakan pelatihan tersebut sebagai antisipasi apabila personel terjebak di lingkungan yang bahaya dan cara membangun keamanan yang berkelanjutan sesuai dengan mandat Perdamaian *Action For Peace*.

Pada tahun 2022 data dari Mine Action, menunjukkan ada wilayah baru yang menjadi target teroris yaitu Sikasso Selatan dalam pemasangan ranjau untuk menjadikan markas dan merekrut anggota baru (MAG 2022). Alat yang dipasang merupakan rakitan ranjau yang tentunya menargetkan warga sipil dan pasukan MINUSMA. Tim UNMAS langsung segera melakukan pembersihan ranjau yang meliputi beberapa proses. Pertama, melakukan survei non teknis yang bertujuan untuk melakukan identifikasi pada wilayah yang terkontaminasi oleh ranjau berdasarkan laporan dari komunitas lokal. Baru setelahnya melakukan survei teknis menggunakan detektor logam dan alat gali untuk mendeteksi lokasi yang akurat dari ranjau dan bahan peledak lainnya. Baru setelahnya melakukan pembersihan yang dilakukan oleh pasukan keamanan nasional, dibantu dengan mitra internasional dari tim Mines Advisory Group dan Dan Church Aid (MAG 2022).

Hasil dari kolaborasi Uni Afrika dan UNMAS dalam program kolaborasi Mine Action telah membawa banyak perubahan positif, menurut data dari UNMAS pada tahun 2018-2023 korban dari ranjau, dan bom rakitan mengalami penurunan sebesar 50% dari 13.500 menjadi 6.700 korban yang mayoritas terkena dari masyarakat sipil (MAR 2023). Dari data yang ditunjukkan membuktikan perkembangan yang signifikan membuktikan bahwa program Mine Action berjalan efektif dan harus terus dilakukan untuk mengurangi ancaman masyarakat Mali. Sesuai dengan indikator Proaktif yaitu melakukan deteksi bom melalui program untuk melindungi masyarakat Mali.

Secara keseluruhan beberapa upaya-upaya Uni Afrika yang telah diterapkan di Mali berjalan secara efektif, terutama dari strategi proaktif dan defensif. Dari tindakan Proaktif, penyerangan kamp dan membunuh pemimpin

teroris menjadi sangat aktif diluncurkan. Bisa dilihat dari operasi militer untuk membantu tentara Prancis dalam misi Serval, dalam misi tersebut berhasil menghancurkan kamp teroris AQIM yang berada di wilayah Adfar De Ifoghas dan juga dalam membunuh pemimpin AQIM yaitu Abu Zeid yang tewas pada saat itu. Sedangkan tindakan defensif yang paling aktif, dalam penguatan lembaga penguatan otoritas keamanan yaitu kolaborasi Uni Afrika dengan UNMAS melalui program Mine Action yang dilaksanakan pada tahun 2018-2023. Dampaknya memberikan penurunan korban dari ranjau dan bom rakitan sebesar 50% dari 13.500 menjadi 6.700 korban yang mayoritas terkena dari masyarakat sipil.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Negara Mali mengalami banyak konflik dari tahun 2013 hingga 2023 yang disebabkan oleh kelompok separatis dan teroris. Kondisi Pemerintah tidak memiliki kemampuan legitimasi yang kuat dan tata kelola buruk, hal ini disebabkan oleh aksi kudeta militer sehingga tidak bisa mengatasi permasalahan terorisme secara efektif. Ketidaksanggupan pemerintah Mali mengharuskan bantuan intervensi dari organisasi Internasional. Uni Afrika sebagai organisasi regional memiliki wewenang sebagai organisasi regional yang berperan penting dalam berkoordinasi misi-misi internasional yang akan diterapkan di Mali. Oleh karena itu, Uni Afrika menerapkan beberapa upaya dalam mengatasi kelompok teroris AQIM di Mali yang dapat dianalisis menggunakan teori kontra terorisme dalam jurnal *“Collective versus Unilateral From Responses to Terrorism”* karya Todd Sandler yang dimana penerapan strateginya dibagi menjadi Proaktif dan Defensif.

Hasil dari penelitian, upaya yang dilakukan Uni Afrika dalam tindakan proaktif atau pendekatan secara militer dengan menargetkan kelompok secara langsung, melalui misi militer AFISMA yang diluncurkan pada tahun 2013 membantu menyerang markas teroris AQIM pada operasi militer Serval yang dilakukan Pasukan Prancis dan Chad di wilayah Adrar de Ifoghas. Dengan keberhasilan dalam menghancurkan selusin gudang senjata, 15 kendaraan berlapis baja, serta pabrik pembuatan bom rakitan. Selain itu, markas serta pimpinan AQIM tewas dalam operasi tersebut. Walaupun misi tersebut tidak selesai hingga akhir

karena terkendala oleh keterbatasan dana dan logistik. Selain itu misi gabungan terakhir dari Uni Afrika melalui operasi militer gabungan G5 Sahel yang menggabungkan militer Mali dan Burkina Faso pertama diluncurkan di perbatasan Mali, Burkina Faso, dan Niger dengan nama operasi Hawbi dan Pagnali. Dalam operasi tersebut mereka menurunkan 5000 personel yang berasal dari batalion Mali dan Burkina Faso. Hasil dari operasi tersebut berhasil menghancurkan kelompok teroris di wilayah perbatasan.

Kedua misi intelijen untuk pengumpulan informasi dari Proses Nouakchott merupakan pertemuan rutin para pimpinan tinggi intelijen kawasan Sahel. Dalam pertemuan tersebut membahas strategi kerja sama regional dalam berbagi informasi ancaman, pengawasan perbatasan, serta tantangan dalam melawan terorisme. Hasil dari pembahasan rutin tersebut diimplementasikan dalam beberapa operasi bantuan Perjanjian Ouagadougou mengenai mekanisme dalam Pemilihan Presiden agar berjalan kondusif dan damai di Mali. Tindakan proaktif terakhir diimplementasikan oleh misi intelijen dalam operasi militer gabungan Bourgou IV yang dilakukan oleh organisasi G5 Sahel untuk menemukan markas serta pimpinan teroris yang berada di wilayah Tofa Gala.

Ketiga upaya proaktif dalam melacak sumber pendanaan teroris, Uni Afrika bersama Tim Specialized Investigation Bridge (SIB) bergerak dibawah pengawasan Jaksa Penuntut Umum dan hakim investigasi di Pengadilan Khusus dalam melakukan pelacakan sumber keuangan teroris AQIM. Hasil dari informasi tersebut menghasilkan penangkapan dua orang yang dicurigai akan melakukan tindakan teroris dan mengirim dana kepada kelompok teroris. Selain itu, tim SIB melakukan kerjasama dengan FIU dalam kurun waktu 2014-2018 dengan hasil

temuan 178 laporan terkait dana mencurigakan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan total dana Frans CFA 63 miliar. Namun yang dikirimkan baru 20 karena banyak melalui prosedur yang lama atau masih dalam peninjauan dari pihak Jaksa.

Hasil investigasi yang lain menemukan sumber terakhir digunakan kelompok teroris AQIM melalui penerapan sistem zakat diberlakukan di wilayah utara agar tidak terdeteksi oleh otoritas keamanan. Aksi tersebut terbukti ketika melakukan penangkapan seorang kurir yang membawa hasil zakat kepada sebuah lembaga amal yang ilegal menjadi sumber pendanaan kelompok teroris yang dimana hasilnya dibeli kendaraan, senjata, dan amunisi untuk digunakan pada operasi teroris di Mali, Sahel dan Niger.

Strategi defensif yang berfokus dalam perlindungan terhadap target teroris dan pengembangan kapasitas militer, upaya yang pertama dilakukan Uni Afrika adalah mengadakan program pelatihan militer Amani Africa yang diikuti oleh militer, kepolisian dan masyarakat dengan tujuan untuk menjadikan pasukan African Standby Force. Dampak dari pelatihan militer Amani Africa bisa dilihat dari pengalaman 10 tahun terakhir, mereka melakukan operasi perdamaian internasional PBB di 11 negara sebagai negara yang menyumbang militer paling banyak dengan total 35.000 personel dalam misi tersebut. Kemudian rekomendasi dari lembaga ACSRT yang bertugas dalam menganalisis dan menyusun strategi dalam menguatkan keamanan negara. Hasil analisis yang ditemukan pada lembaga legitimasi dan keamanan (Militer, Polisi, Intelijen, Hukum) masih lemah.

Khusus bagian legitimasi, ACSRT memberi rekomendasi agar otoritas nasional untuk terbuka terkait tata kelola negara yang buruk, sehingga sangat penting membuka dialog antar pemerintah dan komunitas lokal untuk mengetahui

keluhan dan solusi permasalahan. Kemudian rekomendasi untuk peningkatan kemampuan militer yang tidak hanya berfokus dalam kapasitas bertempur saja melainkan harus paham mengenai cara memberlakukan masyarakat lokal sesuai hak asasi manusia dan hukum humaniter. Implementasi dari rekomendasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan pelatihan antara ACSRT dengan United Nation Office Counter Terrorism. Isi dari pertemuan tersebut mengenai perlindungan terhadap soft target dengan cara memberikan panduan dan praktik baik tentang kerangka kerja dan praktik internasional yang mencakup penilaian risiko, ancaman, dan kerentanan.

Langkah defensif lain dari Uni Afrika dengan melakukan kerjasama dengan UNMAS untuk melindungi masyarakat Mali dari ancaman bom atau ranjau yang dipasang oleh kelompok teroris. Melalui program-program edukasi mengenai bahan peledak yang diberikan untuk masyarakat, hasilnya sebanyak 21,1 juta jiwa menerima manfaat di wilayah Afrika. Selain itu, pada tahun 2023 peningkatan pada sekolah yang sudah mengintegrasikan pendidikan perlindungan bahan peledak ke dalam kurikulum sebesar 36% yang sebelumnya pada tahun 2018 hanya mencapai 30%. Kemudian terdapat aksi-aksi yang dilakukan di lapangan untuk melakukan pembersihan ranjau dengan menggunakan alat pendeteksi logam. Hasil dari pelaksanaan pembersihan ranjau dari tahun 2018 hingga 2023 mengalami penurunan sebesar 50% dari sebanyak 13.500 menjadi 6.700 korban dari masyarakat sipil.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait upaya kontra terorisme yang telah diterapkan di Mali, penulis sadar masih terdapat kekurangan dalam pengumpulan data dan menganalisis penerapan strategi. Penulis berharap masih bisa bermanfaat bagi pembaca dan hasil penelitian bisa menjadi rujukan dalam melihat strategi terbaru Uni Afrika ditahun setelahnya 2024 apakah strategi yang diterapkan dapat mengurangi jumlah aksi terorisme. Kemudian melihat dari perspektif organisasi PBB ditinjau seberapa jauh efektifitasnya sehingga bisa menjadi acuan mana strategi kontra terorisme yang berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kasus konflik yang terus meningkat di Mali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhijit Mohanty. 2018. "Mali Crisis: A Historical Perspective of the Azawad Movement." *Geopolitical Monitor*, 2018.
<https://www.geopoliticalmonitor.com/mali-crisis-a-historical-perspective-of-the-azawad-movement/>.
- Africa Center. 2018. "The G5 Sahel Joint Force Gains Traction." *Africa Center for Strategic Studies*, 2018. <https://africacenter.org/spotlight/g5-sahel-joint-force-gains-traction/>.
- Africa Defense Forum. 2019. "Saving The Sahel." *Defence Web*, 2019.
<https://www.defenceweb.co.za/joint/diplomacy-a-peace/saving-the-sahel/#https://www.defencewebads.co.za/www/delivery/cl.php?zoneid=5>.
- African Union Commission. 2014. "The African Union Mine Action and Explosive Remnants of War Strategic Framework." Peace and Security Department.
<https://papsrepository.africanunion.org/handle/123456789/180>.
- Alexis Arief. 2023. *Crisis In Mali*. Policy Research Report No. R42664. United States Congressional Research Service.
<https://sgp.fas.org/crs/row/IF10116.pdf>.
- Amani Africa. 2021. *Status Report on the Full Operationalization of ASF and CLB*. <https://amaniafrica-et.org/status-report-on-the-full-operationalization-of-asf-and-clb/>.
- Arab Weekly. 2019. "French and Sahel Soldiers Step up Campaign against Jihadists." *The Arab Weekly*, 2019.
<https://www.peaceau.org/en/article/conclusions-of-the-donors-conference-for-the-african-led-international-support-mission-in-mali-and-the-malian-defense-and-security-forces>.
- BBC. 2015. "At Least 20 Dead After Mali Hotel Attacked by Islamist Gunmen." *BBC NEWS*, 2015. <https://www.bbc.com/news/world-africa-34879955>.
- . 2020. "Mali Hostages: Sophie Pétronin and Soumaïla Cissé Freed in Prisoner Swap." *BBC NEWS*, 2020. <https://www.bbc.com/news/world-europe-54472504>.
- Canadian Security Intelligence Service. 2025. "Terrorism in North Africa and the Sahel — The Expansion of a Regional Threat?"
<https://www.canada.ca/en/security-intelligence-service/corporate/publications/terrorism-in-north-africa-and-the-sahel-the-expansion-of-a-regional-threat/chapter-1-understanding-the-regional-strategy-of-al-qaeda-in-the-islamic-maghreb.html>.
- Catherine Barnes. 2002. "Accord an International Review of Peace Initiatives." *Conciliation Resources*, no. 13: 56–63.

- Charbonneau, Bruno. 2017. "Intervention in Mali: Building Peace between Peacekeeping and Counterterrorism." *Journal of Contemporary African Studies* 35 (4): 415–31. <https://doi.org/10.1080/02589001.2017.1363383>.
- Cold-Ravnkilde, Signe Marie. 2013. *War and Peace in Mali: Background and Perspectives*. With Dansk Institut for Internationale Studier. DIIS Report, 2013:33. Copenhagen: Danish Institute for International Studies.
- Dan E. Stigall. 2015. "The French Military Intervention in Mali, Counter-Terrorism, and the Law of Armed Conflict." *Military Law Review* 223 (1). <https://ssrn.com/abstract=2604235>.
- detikNews. 2013. "Dewan Keamanan PBB Gelar Sidang Khusus Bahas Konflik Mali." *Detikcom*, 2013. <https://news.detik.com/internasional/d-2141292/dewan-keamanan-pbb-gelar-sidang-khusus-bahas-konflik-mali>.
- Emma Skeppström, Cecilia Hull Wiklund, and Michael Jonsson. 2014. "European Union Training Missions: Security Sector Reform or Counter-Insurgency by Proxy?" *European Security* 24 (2): 353–67. <https://doi.org/10.1080/09662839.2014.972382>.
- Fanny Angelia. 2013. "KONEKSI AL-QAEDA DAN AQIM DI MALI UTARA: IDEOLOGI, JARINGAN, DAN AKTIVISME." *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 2 (3): 249–69.
- FATF. 2013. *Terrorist Financing in West Africa*. Financial Action Task Force. <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/TF-in-West-Africa.pdf.coredownload.inline.pdf>.
- . 2019. *Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures*. <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/fsrb-mer/GIABA-Mutual-Evaluation-Mali-2019.pdf.coredownload.inline.pdf>.
- Fatma Esma Arslan. 2023. "Terrorism Deaths in Africa's Sahel Spiked 2,000% in 15 Years: Report." *Anadolu Agency*, 2023. <https://www.aa.com.tr/en/africa/terrorism-deaths-in-africas-sahel-spiked-2-000-in-15-years-report/2852664#:~:text=%E2%80%9CAcross%20the%20Sahel%2C%202%2C074%20people,%25%20in%202007%2C%20it%20added>.
- Galantino, Maria Grazia, and Maria Raquel Freire, eds. 2015. *Managing Crises, Making Peace: Towards a Strategic EU Vision for Security and Defense*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137442253_12.
- Harmon, Stephen A. 2016. *Terror and Insurgency in the Sahara-Sahel Region: Corruption, Contraband, Jihad and the Mali War of 2012-2013*. International Political Economy of New Regionalisms Series. London New York: Routledge, Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.4324/9781315612096>.

- Hassan Ould Moctar. 2022. "Timeline: France's Efforts to Combat Islamist Militants in Mali." *Al Jazeera*, 2022.
<https://www.aljazeera.com/opinions/2022/2/15/it-is-time-for-europe-to-learn-from-its-mistakes-in-the-sahel>.
- Ifan Wijaya. 2023. "Mali Minta Pasukan Misi Perdamaian PBB Pergi Karena Dinilai Gagal." *IDN TIMES*, 2023.
<https://www.idntimes.com/news/world/mali-minta-pasukan-misi-perdamaian-pbb-pergi-karena-dinilai-gagal-c1c2-01-8tblk-44lfg5>.
- International Crisis Group. 2022. "Tracking Conflict Worldwide." *International Crisis Group*, 2022.
<https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B0%5D=26&created=&page=4>.
- Jonathan Doe. 2018. "5th Ministerial Meeting on Strengthening Security Cooperation and Operationalization of the African Peace and Security Architecture in the Sahelo-Saharan Region." *African Union, Peace and Security Department*, 2018. <https://www.peaceau.org/en/article/5th-ministerial-meeting-on-strengthening-security-cooperation-and-operationalization-of-the-african-peace-and-security-architecture-in-the-sahelo-saharan-region>.
- Jonathon Rees. 2016. "What next for the African Standby Force?" *ISS Today*, 2016. <https://issafrica.org/iss-today/what-next-for-the-african-standby-force>.
- Laurent de Castelli. 2014. "Mali: From Sanctuary to Islamic State." *The RUSI Journal* 159 (3): 62–68. <https://doi.org/10.1080/03071847.2014.928016>.
- Laurent Lagneau. 2013. "Mali : Les Forces Françaises et Tchadiennes Ont Tapé Fort Dans l'Adrar Des Ifoghas." *Opex360*, 2013.
<https://www.opex360.com/2013/03/01/mali-les-forces-francaises-et-tchadiennes-ont-tape-fort-dans-ladrar-des-ifoghas/>.
- MAG. 2022. "Clearing Landmines and Cluster Bombs." *MAG International*, 2022. <https://www.maginternational.org/what-we-do/clear-landmines-clusterbombs/>.
- MAR. 2023. "MALI CLEARING THE MINES 2023." *Mine Action Review*, 2023.
https://www.mineactionreview.org/assets/downloads/Mali_Clearing_the_Mines_2023.pdf.
- Marsden Momanyi. 2014. "AMANI AFRICA I Cycle." *Peace and Security Council of the African Union*, 2014.
<https://www.peaceau.org/en/article/amani-africa-i-cycle>.
- Martin Ewi and Kwesi Aning. 2006. "Assessing the Role of the African Union in Preventing and Combating Terrorism in Africa." *African Security Review* 15 (3): 32–46.

- Maru, Mehari Taddele. 2013. "African-Led International Support Mission in Mali (AFISMA): Military Ahead of Politics." *Al Jazeera Center for Studies*, 2013.
- Melanie Sauter. 2024. "The Mali Puzzle: International Isolation, Anti-French Sentiments, and Withdrawal of UN Peacekeepers." *Georgetown Journal of International Affairs*, 2024.
https://www.researchgate.net/publication/377473345_The_Mali_Puzzle_International_Isolation_Anti-French_Sentiments_and_Withdrawal_of_UN_Peacekeepers.
- Mensah, Isaac. 2023. "A Review of Mali's Counterterrorism Approach in the Light of African Union Interventions." *Critical Studies on Terrorism* 16 (3): 523–36. <https://doi.org/10.1080/17539153.2023.2229617>.
- Messay. 2013. "Conclusions of the Donors' Conference for the African-Led International Support Mission in Mali and the Malian Defense and Security Forces." *Peace and Security Council of the African Union*, 2013.
<https://www.peaceau.org/en/article/conclusions-of-the-donors-conference-for-the-african-led-international-support-mission-in-mali-and-the-malian-defense-and-security-forces>.
- . 2015. "Landmark AMANI AFRICA II Field Training Exercise Concludes in South Africa." *African Union, Peace and Security Department*, 2015. <https://www.peaceau.org/en/article/landmark-amani-africa-ii-field-training-exercise-concludes-in-south-africa>.
- MINUSMA. 2023. "Mine Action." *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali*, 2023.
<https://minusma.unmissions.org/en/mine-action>.
- Nur Aini. 2022. "Prancis Mulai Tarik Militer Dari Mali." *REPUBLIKA*, 2022.
<https://internasional.republika.co.id/berita/rdh4vw577191844/prancis-mulai-tarik-militer-dari-mali>.
- Observer. 2012. "Tuareg Civilians Attacked in Bamako." *France 24 Observers*, 2012. <https://observers.france24.com/en/20120203-tuaregs-attacked-malian-capital-retribution-rebellion-north-civilian-foreigners-fleeing-looting-soldiers-bamako>.
- Peace and Security Council of the African Union. 2013. *Progress Report of the Chairperson of the Commission on the African-Led International Support Mission in Mali*. Communiqué PSC/PR/COMM.(CCCLVIII).
<https://www.peaceau.org/uploads/358th-psc-meeting-progress-report-afisma.pdf>.
- Pezard, Stephanie, and Michael Shurkin. 2015. "A Brief History of Mali's Rebellions and the Implementation of Peace Accords." In *Achieving Peace in Northern Mali*, 5–22. Past Agreements, Local Conflicts, and the

- Prospects for a Durable Settlement. RAND Corporation. JSTOR.
<http://www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt15zc57q.9>.
- Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA, Dr. Saifullah, S. Ag., M. Ag, and Tabrani. ZA, S. Pd.I., M.S.I., MA. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1301/1/Full%20Buku%20MP%20Kualitatif%20&%20Grounded%20Theory.pdf>.
- Reuters. 2019. "Timeline: France's Efforts to Combat Islamist Militants in Mali." *Reuters*, 2019. <https://www.reuters.com/article/us-france-mali-timeline/timeline-frances-efforts-to-combat-islamist-militants-in-mali-idUSKBN1Y11HF/>.
- RFI. 2016. "Mali: Le Mouvement Pour Le Salut de l'Azawad, Nouveau Groupe Politico-Militaire." *RFI Afrique*, 2016.
<https://www.rfi.fr/fr/afrique/20160911-mali-creation-msa-nouveau-mouvement-politico-militaire>.
- Sandler, Todd. 2005. "Collective versus Unilateral Responses to Terrorism." *Public Choice* 124 (1–2): 75–93. <https://doi.org/10.1007/s11127-005-4747-y>.
- Sebastian Elischer. 2022. "Populist Civil Society, the Wagner Group, and Post-Coup Politics in Mali." *West African Papers*, no. 36.
<https://doi.org/10.1787/b6249de6-en>.
- Stanley O. Ehiane. 2018. "Strengthening the African Union (AU) Counter-Terrorism Strategy in Africa." *Journal of African Union Studies* 7 (2): 109–26.
- Sten Hagberg and Gabriella Körling. 2012. "Socio-Political Turmoil in Mali: The Public Debate Following the 'Coup d'État' on 22 March 2012." *Africa Spectrum* 47 (3): 111–25.
- Tchioffo Kodjo. 2013. "Planning Conference Begins in Mali to Revise AFISMA Joint Concept of Operations." *African Union, Peace and Security Department*, 2013. <https://www.peaceau.org/en/article/planning-conference-begins-in-mali-to-revise-afisma-joint-concept-of-operations>.
- . 2015. "Report of the Commission of the African Union on the Follow-up to the Relevant Provisions of the Declaration of the Summit of the Member Countries of the Nouakchott Process of 18 December 2014." *African Union, Peace and Security Department*, 2015.
<https://www.peaceau.org/en/article/report-of-the-commission-of-the-african-union-on-the-follow-up-to-the-relevant-provisions-of-the-declaration-of-the-summit-of-the-member-countries-of-the-nouakchott-process-of-18-december-2014>.
- . 2018. "AFISMA Transfers Its Authority to MINUSMA." *African Union, Peace and Security Department*, 2018.

<https://www.peaceau.org/en/article/afisma-transfers-its-authority-to-minusma>.

- Theodore Kouts. 2019. “ILLICIT FINANCIAL FLOWS: THE ROLE OF AL QAEDA AND ITS AFFILIATES IN THE ISLAMIC MAGHREB.” *OECD Publishing*, 2019, 10–27. <https://doi.org/10.1787/0938fefa-en>.
- UNOCT. 2022. “UNOCT and ACSRT Convene African Union Member States to Strengthen Resilience of Vulnerable Targets against Terrorist Attacks.” *United Nation*, 2022. <https://www.un.org/counterterrorism/events/unoct-and-acsr-convene-african-union-member-states-strengthen-resilience-vulnerable-targets>.
- VOA. 2018. “Afiliasi Al-Qaeda Klaim Tanggung Jawab Serangan Di Mali.” *VOA Indonesia*, 2018. <https://www.voaindonesia.com/a/afiliasi-al-qaeda-klaim-tanggung-jawab-serangan-di-mali/4463993.html>.
- William Moraes Roberto, Marilla Bernades Closs, and Giordano Bruno Antoniazzi Ronconi. 2013. “The Situation in Mali.” *UFRGS Model United Nations Journal* 1: 71–97.
- William Thornberry and Jaclyn Levy. 2011. “Al Qaeda in the Islamic Maghreb.” *Center For Strategic & International Studies*, 2011. <https://www.csis.org/analysis/al-qaeda-islamic-maghreb>.
- Yaye Nabo Sène. 2023. “Action for Peacekeeping: An All-Women Police Unit from Egypt Breaks New Ground in Mine Action in Central Mali.” *MINUSMA*, 2023. <https://minusma.unmissions.org/en/action-peacekeeping-all-women-police-unit-egypt-breaks-new-ground-mine-action-central-mali>.